



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN
NO. 0153/Pdt.G/2017/PA.PPG MENGENAI
PERCERAIAN TANPA DISERTAI
IKRAR TALAK**

SKRIPSI



Oleh

**NURMA SRIYATUN
11521201544**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1441 H/ 2019 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN
NO. 0153/Pdt.G/2017/PA.PPG MENGENAI
PERCERAIAN TANPA DISERTAI
IKRAR TALAK**

SKRIPSI

*Skripsi Diajukan untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum
(SH)*



UIN SUSKA RIAU

Oleh

**NURMA SRIYATUN
11521201544**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1441 H/ 2019 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian No. 0153/Pdt.G/2017/PA.Ppg Mengenai Perceraian Tanpa Disertai Ikrar Talak*, yang ditulis oleh :

Nama : Nurma Sriyatun
 NIM : 11521201544
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 30 Desember 2019
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Lantai 3(tiga) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Desember 2019
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag
 Sekretaris
Ahmad Fauzi, M.Ag
 Penguji I
Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag
 Penguji II
Ade Fariz Fakhrrullah, M.Ag









Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum


Dr. Drs. H. Hajjar, M.Ag
 NIP. 19580712 198603 1 005

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dr. Zulfahmi Bustami., M. Ag
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Pekanbaru, 11 Desember 2019

No. : Nota Dinas
Lamp : -
Hal : Pengajuan Skripsi
Sdr. NURMA SRIYATUN

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah
dan Ilmu Hukum
Di-
Pekanbaru


Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberikan petunjuk dan bimbingan seperlunya serta mengadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi yang berjudul "**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAAN NO. 0153/Pdt.G/2017/PA.PPG MENGENAI PERCERAIAN TANPA DISERTAI IKRAR TALAK**" yang ditulis oleh Sdr. **Nurma Sriyatun** telah dapat diajukan sebagai syarat untuk menempuh ujian Munaqasah guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat Sdr. **Nurma Sriyatun** tersebut dapat dipanggil dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU.

Demikianlah harapan kami, mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat hendaknya.

Wassalam
Pembimbing


Dr. Zulfahmi Bustami., M. Ag
19710101199703 1010

ABSTRAK

Nurma Sriyatun (2019): Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian No. 0153/Pdt.G/2017/PA.Ppg Mengenai Perceraian Tanpa disertai Ikrar Talak

Indonesia sebagai negara hukum mengatur segala tindak tanduk warganya berdasarkan hukum yang telah disepakati termasuk dalam hal perdata khususnya perceraian. Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, perceraian yang sah dan diakui menurut hukum Indonesia adalah perceraian yang dilakukan di depan sidang pengadilan. Khusus untuk cerai talak, putusan perceraian dalam sidang pengadilan baru dapat dianggap berlaku dan sah apabila telah terjadi pengucapan ikrar talak yang dilakukan oleh pihak suami di hadapan pengadilan setelah putusan perceraian di putus dalam sidang pengadilan.

Pada April 2017 Pengadilan Agama Pasir Pengaraian menerima pengajuan gugatan cerai talak yang didaftarkan dengan Nomor Perkara 153/Pdt.G/2017/PA.Ppg. Dalam sidang pembacaan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian memutuskan mengabulkan gugatan pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka pengadilan dan membebaskan biaya perkara kepada pemohon. Namun, dalam jangka waktu 6 (bulan) sejak putusan dibacakan, pemohon tidak datang ke pengadilan untuk mengucapkan ikrar talaknya sehingga putusan hasil sidang gugatan cerai talak sebelumnya dinyatakan tidak berkekuatan hukum tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang putusan dan pertimbangan Hakim terhadap perkara Nomor 0153/Pdt.G/2017/PA.Ppg mengenai perceraian tanpa disertai ikrar talak serta mengenai analisis hukum Islam terhadap perceraian tanpa disertai ikrar talak pada putusan perkara Nomor 0153/Pdt.G/2017/PA.Ppg ini.

Penelitian ini merupakan metode penelitian Hukum Islam normatif yang dilaksanakan dengan menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan objek penelitian yaitu perceraian tanpa disertai ikrar talak di hadapan pengadilan yang terjadi di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dengan Nomor Perkara 0153/Pdt.G/2017/PA.Ppg. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian perkara No. 0153/Pdt.G/2017/PA.Ppg dan sumber data sekundernya yaitu buku bacaan, jurnal dan artikel lain yang terkait dengan objek penelitian ini.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ikrar talak yang tidak diucapkan di hadapan sidang pengadilan agama dianggap sah menurut Hukum agama namun menimbulkan efek negatif baik itu yang terkait dengan administrasi perdata maupun terhadap kehidupan anak dan istri yang digantung serta adanya kemungkinan pasangan tersebut untuk bersatu kembali padahal secara agama pernikahan mereka telah berakhir karena talak yang diucapkan telah 3 (tiga) kali atau lebih dengan alasan belum terdaftarnya perceraian mereka di Pengadilan Agama.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia serta hidayah dan inayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN NOMOR 0153/Pdt.G/PA.Ppg MENGENAI PERCERAIAN TANPA DISERTAI IKRAR TALAK”**.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah berkorban harta dan jiwa demi kejayaan Islam sehingga saat ini kita bisa merasakan hasil jerih payah Beliau.

Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, pemikiran, dukungan, semangat dan do’a penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Kepada Ayahanda tercinta H. Maniso dan Ibunda Hj. Kusmia yang telah memberikan dukungan, motivasi dan do’a kepada ananda baik secara materil maupun spiritual. Jasa dan kasih sayangmu akan ananda kenang hingga yaumul akhir. Keluarga besarku yang saya cintai (Kakak Suyanti, Kakak Suryani, Abanganda Kusmanto, Abanganada Suprianto, Abanganda Abdi Rahman, Abanganda Rahmadi dan Adinda Imam Fajri), yang telah mendukung, memotivasi penulis dengan kasih sayang yang tulus dan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. H. Hajar M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil Dekan I. II III serta bapak dan ibu dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan kemudahan penulis melakukan perkuliahan dan mencurahkan ilmunya kepada penulis.
4. Yang terhormat Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga dan Ade Fariz Fahrullah, M. Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum keluarga.
5. Bapak Dr. Zulfahmi Bustami M.Ag sebagai pembimbing penulis yang telah bersedia memberikan bimbingan dan waktunya kepada penulis dalam penyelesaian penulis skripsi ini dan Ibu Mardiana, MA selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing ananda selama ananda menuntut ilmu di Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Seluruh Dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau
7. Bapak Burhanuddin, SH., MH sebagai Panitra di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian di tempat ananda melaksanakan PKL (Praktek Kerja Lapangan) ananda ucapkan terimakasih telah membantu ananda dalam pembuatan skripsi ini.
8. Pimpinan perpustakaan Al-Jami'ah dan perpustakaan Fakultas Syaria'ah dan Hukum Beserta karyawan dan karyawanati telah mengizinkan penulis untuk meminjam buku-buku referensi.
9. Ucapan terimakasih untuk sahabatk-sahabatku tersayang lala Eva Melyana Insani, Nur Yani, Elsi Saputri, Sukni Rosidah, Roviatus Sakdiah, Muthia Rahmathul Husna, teman-teman semasa KKN (Kuliah Kerja



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nyata) dan teman-teman teman seperjuangan yang sama-sama berjuang dan selalu banyak memberi bantuan, dukungan, selalu memberi motivasi serta semangat.

10. Kemudian kepada pihak-pihak terkait yang membantu penulis baik itu secara pikiran, tenaga maupun materil.

Demikian skripsi ini penulis selesaikan sebaik mungkin. Namun penulis menyadari bahwa penulis hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan karya ilmiah ini untuk masa yang akan datang.

Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya ‘Aamiin-‘Aamiin ya Rabbal ‘Alamin..

Pekanbaru, 02 Desember 2019
Penulis,

NURMA SRIYATUN
NIM. 11521201544

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN UMUM PERADILAN AGAMA DI INDONESIA	
A. Definisi Peradilan Agama	12
1. Pengertian Peradilan Agama	12
2. Sejarah Peradilan Agama	14
3. Dasar Hukum Peradilan	20
4. Rukun Peradilan	22
B. Pengadilan Agama Pasir Pangaraian	22
1. Sejarah Pengadilan Agama Pasir Pangaraian.....	22
2. Letak Geografis	24
3. Visi dan Misi	25
4. Struktur Organisasi.....	25
BAB III TINJAUAN TEORITIS	
A. Perceraian	28
1. Pengertian Perceraian.....	28
2. Dalil <i>Kehujjahan</i> Talak	33
3. Rukun dan Syarat Talak	34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Hikmah Terjadinya Perceraian.....	36
5. Macam-macam Talak.....	38
6. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian.....	45
7. Akibat Putusnya Perkawinan	46
B. Tata Cara Cerai Talak di Indonesia.....	49
1. Pendaftaran Permohonan Cerai Talak.....	49
2. Pemeriksaan dan Penetapan Perkara Cerai Talak oleh Pengadilan Agama.....	51
C. Putusan Hakim	54

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM MENGENAI
PERCERAIAN TANPA DISERTAI IKRAR TALAK**

A. Putusan Hakim dalam Perkara No. 0153/Pdt.G/2017/PA.Ppg Mengenai Perceraian Tanpa disertai Ikrar Talak	57
B. Pertimbangan Hakim dalam Perkara No. 0153/Pdt.G/2017/PA.Ppg Mengenai Perceraian Tanpa disertai Ikrar Talak	61
C. Analisa Hukum Islam Mengenai Perceraian Tanpa Disertai Ikrar Talak.....	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pasir Pengaraian	27
--	----





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ini merupakan cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Perkawinan¹ adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.²

Perkawinan secara istilah dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.³

Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 yaitu: pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqangholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴

¹ Beberapa penulis terkadang menyebut pernikahan dengan perkawinan. Dalam Bahasa Indonesia sendiri “perkawinan” berasal dari kata “kawin” yang artinya membentuk hubungan keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Kata kawin umum digunakan untuk manusia, hewan maupun tumbuhan. Sedangkan kata nikah hanya digunakan untuk manusia. Lihat : Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 8

² *Ibid.*

³ R. Subekti dan R. Tjitrosudiro, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Burgerlijk Wetboek*, Bab I Pasal I UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, cet. 30, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999), h. 537. Lihat juga : Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 522. Lihat Juga: Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 51.

⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. 4, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), h. 114. Lihat juga : Muhammad Amin Suma, *Op. Cit*, h., 569.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan perkawinan dalam KHI yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sebagaimana firman Allah dalam surat ar-Rum [30] ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang.”⁵

Semua orang menginginkan perkawinannya dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dan untuk mewujudkan itu semua tidaklah mudah. Perkawinan harus dijaga sedemikian rupa agar tidak hancur ditengah jalan yang menyebabkan terjadinya sebuah perceraian.

Dalam istilah hukum yang digunakan dalam UU Perkawinan untuk menjelaskan “perceraian” atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang selama ini sebagai suami dan istri digunakan istilah “Putusnya Perkawinan”.⁶

Kata perceraian dalam keluarga seakan merupakan “kiamat” bagi sebuah mahligai rumah tangga. Setiap orang tentu tidak menginginkan perceraian yang terjadi dalam kehidupan mereka. Namun jika kita lihat fenomena perceraian makin marak belakangan ini, banyak alasan yang

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Cordoba Special For Muslimah*, Bandung: PT. Cordoba International Indonesia, 2007), Q.S A-Rum [30] : 21, h. 406.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 189.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuat suami istri mengambil jalan perceraian seperti misalnya karena tidak saling kecocokan, perselingkuhan, KDRT, dan karena adanya orang ketiga dalam rumah tangga dan lain sebagainya.

Perceraian merupakan putusnya perkawinan antar suami-istri dalam hubungan keluarga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perceraian berarti perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata *bercerai* itu sendiri berarti “menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami istri.”⁷

Sebagaimana dijelaskan dalam QS. At-thalak [65] :1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ رَبَّكُمُ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya : Hai nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.⁸

Dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa :

⁷ Tim Pandom Media, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru, (Jakarta: Pandom Media Nusantara, 2014), Cet. Ke-1, h. 156

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op. Cit*, Q.S At-Thalaq [65] : 1, h. 558.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) diikrarkan di depan sidang Pengadilan Agama.
2. Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁹

Setelah para pihak mengajukan perkara perceraianya ke pengadilan dan telah melalui tahap mediasi tapi gagal, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan duduk perkaranya. Untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil yang diajukan, maka pihak yang membantah dalil-dalil yang diajukan harus membuktikannya. Sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 1865 KUH perdata yang berbunyi “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”¹⁰

Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian nomor 153/Pdt.G/2017/PA.Ppg yang berperkaranya yakni saudara Darwis Ritonga bin

⁹ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 19-20.

¹⁰ Subekti Dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Balai Pustaka, tt), h.475.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dame Ritonga sebagai pemohon (suami), Linda Wati Hasibuan binti syaripudin sebagai termohon (istri), pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah nikah di KUA Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Batam Kepulauan Riau padatanggal 31 Agustus 2008 Akta Nikah Nomor 936/142/VIII/2008.

Penyebab perselisihan dan pertengkaran disampaikan oleh suami bahwa rumah tangganya dengan termohon tidak harmonis lagi setelah pernikahan, inti perselisihan atau pertengkaran karena termohon apabila dinasehati oleh pemohon termohon selalu membantah ucapan pemohon, termohon kurang melayani seperti makan minum pemohon. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 7 Februari 2017 yang menyebabkan antara pemohon dan termohon pisah rumah.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan oleh pemohon oleh sebagaimana diatas kiranya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian memberi putusan dengan amarnya yang berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas permohonan pemohon itu, termohon bersedia untuk bercerai dengan menuntut haknya: Nafkah iddah, Mut'ah berupa uang, Maskan berupa uang, Nafkah untuk dua orang anak setiap bulan sampai anak dewasa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemohon tidak menyanggupi semua tuntutan termohon dan hakim memutuskan sebagian tuntutan termohon dan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak tetapi pemohon tidak mengucapkan ikrar di depan sidang pengadilan agama Pasir Pengaraian oleh karena itu putusan ini tidak mempunyai kekuatan hukum. Sedangkan pemohon dan termohon sama-sama menikah baru lagi.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengkaji dan melihat lebih jauh permasalahan tersebut yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian No. 0153/Pdt.G/2017/PA.Ppg Mengenai Perceraian Tanpa Disertai Ikrar Talak.**

B. Batasan Masalah

Penulis memfokuskan penelitian ini kepada putusan Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Mengenai Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian No. 0153/Pdt.G/2017/PA.Ppg Mengenai Perceraian Tanpa Disertai Ikrar Talak.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang penulis paparkan, maka penulis merumuskan beberapa masalah, yakni:

1. Bagaimana putusan Hakim terhadap perkara Nomor 0153/Pdt.G/2017/PA.Ppg mengenai perceraian tanpa disertai ikrar talak?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap perkara Nomor 0153/Pdt.G/2017/PA.Ppg mengenai perceraian tanpa disertai ikrar talak?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap perceraian tanpa disertai ikrar talak pada putusan perkara Nomor 0153/Pdt.G/2017/PA.Ppg?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun hasil yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah terjawabnya semua permasalahan yang dirumuskan, yaitu:

- a) Untuk mengetahui putusan hakim Pengadilan Agama Pasir Pangaraian dalam perkara No. 0153/Pdt.G/2017/PA.Ppg mengenai perceraian tanpa disertai ikrar talak.
- b) Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pasir Pangaraian dalam perkara No. 0153/Pdt.G/2017/PA.Ppg mengenai perceraian tanpa disertai ikrar talak.
- c) Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap perceraian tanpa disertai ikrar talak pada putusan hakim Pengadilan Agama Pasir Pangaraian No. 0153/Pdt.G/2017/PA.Ppg.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

- a. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Menjadikan bahan pertimbangan para penegak hukum dalam hal ini hakim untuk lebih mengedepankan prinsip keadilan dalam memutuskan perkara selain mengedepankan pertimbangan hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan analisis hukum terhadap perceraian yang tidak disertai ikrar talak .

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau sistem untuk mengerjakan sistematika dan metodologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses berfikir, analisis berfikir serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah kajian normatif hukum Islam dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library reseach*), yaitu usaha untuk memperoleh data dengan sumber kepustakaan. Yakni dengan meneliti atau menelaah buku atau literature dan tulisan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Yaitu putusan hakim perceraian yang tidak disertai ikrar talak, pertimbangan hakim perceraian yang tidak disertai ikrar talak dan analisis hukum Islam terhadap perceraian tanpa disertai ikrar talak. Maka jenis penelitian ini disebut penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka.

2. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah perceraian tanpa disertai ikrar talak di hadapan pengadilan.

3. Sumber Data

Penelitian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber data yang digunakan adalah sumber data yang terdiri dari tiga macam:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Bahan hukum primer yaitu data yang langsung diperoleh terkait dengan tema penelitian. Bahan hukum primer ini, yaitu putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian perkara No. 0153/Pdt.G/2017/PA.Ppg.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjadi pendukung dan pelengkap yang berhubungan dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder, merupakan sumber data yang diambil dari literatur, buku-buku yang berhubungan dengan masalah penelitian seperti hukum acara peradilan agama dalam kerangka fiqh al-qadha, fikih munakahat, risalah nikah.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa data pelengkap yang dapat bersumber dari kamus, ensiklopedia hukum, jurnal dan makalah yang disajikan dalam seminar nasional maupun internasional.

4. Teknik Analisa Data

Dari sejumlah data yang berhasil penulis simpulkan, setelah tersusun dalam kerangka yang jelas lalu diberi penganalisaan dengan suatu metode yang dikenal dengan metode analisis (*content analysis*) yaitu dengan memahami kosa kata, pola kalimat dan latar belakang.

Adapun teknik yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

- a. Deduktif

Dengan memaparkan data-data yang bersifat umum, untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi kata khusus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Induktif

Dengan metode ini juga penulis memaparkan data-data yang bersifat khusus, untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi data yang bersifat umum.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulis dalam menyusun serta mempermudah pembaca dalam memahami data dan mengerti isi dari skripsi nantinya, maka penulis membuat sistematika penulisan secara keseluruhan, penulisan penelitian ini terdiri dari 5 bab yang secara garis besar bab-perbab diuraikan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini membahas tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan umum mengenai definisi Peradilan Agama di Indonesia, sejarah, dasar hukum dan rukun peradilan serta tentang Pengadilan Agama Pasir Pangaraian yang meliputi sejarah, letak geografis, visi dan misi serta struktur organisasi.

BAB III : Membahas tentang pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, faktor penyebab perceraian, macam-macam perceraian, akibat putusnya perkawinan, hikmah terjadinya perceraian, pengertian cerai talak, dasar hukum talak, macam-macam talak, syarat dan rukun cerai talak serta tata cara cerai talak di Indonesia, Putusan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : Hasil Penelitian, membahas tentang putusan hakim pengadilan agama pasir pengaraian no. 0153/Pdt.G/2017/pa.ppg mengenai perceraian tanpa disertai ikrar talak, pertimbangan hakim terhadap perkara Nomor 0153/Pdt.G/2017/PA.Ppg mengenai perceraian tanpa disertai ikrar talak, analisis hukum Islam terhadap perceraian tanpa disertai ikrar talak

BAB V : Bagian penutup berisi tentang kesimpulan dan saran berdasarkan aturan-aturan yang telah dibahas dalam bab sebelumnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERADILAN AGAMA DI INDONESIA

A. Definisi Peradilan Agama

1. Pengertian Peradilan Agama

Dalam Bahasa Arab, peradilan disebut *al-qadha* yang secara etimologi memiliki arti:

- Al-faraagh* artinya putus selesai.¹¹ Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Ahzab [33] ayat 37:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾

Artinya: “Maka tatkala Zaid Telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan diasupaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu Telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.”¹²

- Al-Adaa’ artinya menunaikan atau membayar¹³, seperti firman Allah SWT dalam Q.S Al-Jumuah [62] ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

¹¹ Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Agama*, (Jakarta : RajaGrafindo, 2011), h. 9

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op. Cit*, Q.S Al-Ahzab : 37, h. 423.

¹³ Alaidin Koto. *Op. Cit*, h.10.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”¹⁴

- c. Al-Hukm artinya mencegah atau menghalangi. Dari kata inilah maka qadhi-qadhi disebut sebagai hakim, karena mencegah terjadinya kezhaliman orang yang mau berbuat zalim.
- d. Ari lain dari kata *qadha* adalah memutuskan hukum atau membuat suatu ketetapan.¹⁵

Jadi sebenarnya *qadhi* menurut bahasa artinya orang yang memutuskan hukum perkara dan menetapkan. Kemudian, secara terminologi, peradilam atau qadha memiliki beberapa makna, antara lain:

- a. “Kekuasaan yang dikenal (kekuasaan yang mengadili dan memutuskan perkara)”
- b. “Menyelesaikan perkara pertengahan untuk melenyapkan gugat menggugat dan memotong pertengkaran degan hukum-hukum syara’ yang dopetik dari al-Qur’an dan Sunnah”.

Menurut ‘Ukbary dalam kulliatnya yang dimaksud dengan peradilam adalah Peraturan yang harus diikuti, yang terbit dari penguasa, yang mempunyai kekuasaan umum.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa peradilam adalah lembaga yang mempunyai kekuasaan umum untuk mengadili dan

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op. Cit*, Q.S Jumu’ah [62] : 10, h., 555.

¹⁵ Alaidin Koto. *Loc. Cit*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memutuskan perkara antara dua orang atau lebih dengan berlandaskan Al-qur'an da Hadits.¹⁶

2. Sejarah Peradilan Agama

Peradilan agama di Indonesia dalam bentuk yang dikenal sekarang ini merupakan mata rantai yang tidak terputus dari sejarah masuknya agama Islam ke nusantara. Pada abad ke-7 M. Islam telah masuk Indonesia dan telah dianut sebagian orang Indonesia. Penerapan Hukum Islam bukan hanya pada pelaksanaan ibadah-ibadah tertentu melainkan juga diterapkan pula dalam masalah-masalah *muamalat*, *munakahat* dan *uqubat* (jinayah/hudud). Dengan adanya penerapan hukum Islam dalam beberapa hal diatas juga telah ada dan selalu ada pegawai khusus yang mempunyai keahlian dalam hukum Islam di setiap daerah untuk menjalankan sistem peradilan.¹⁷

Penerapan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia sebelum adanya hukum dalam hal penyelesaian masalah *muamalah*, *munakahat*, dan *uqubat* melalui peradilan agama, Indonesia telah memiliki suatu lembaga baik itu lembaga adat ataupun lembaga pemerintahan pada zaman masa kerajaan yang khusus menangani masalah ini. Walaupun secara yuridis lembaga Peradilan Agama belum ada, tetapi dalam praktiknya telah ada penerapan Peradilan Agama dalam proses penyelesaian perkara-perkara tersebut.¹⁸

¹⁶ Alaidin Koto. *Op. Cit*, h. 11.

¹⁷ Alaidin Koto. *Op. Cit.*, h. 190

¹⁸ *Ibid.* h.191



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara sederhana, praktik penyelenggaraan peradilan agama khususnya dalam mengatur perkara perata umat Islam, dapat diperiodisasikan sebagai berikut:

a. Periode Tahkim

Pada awal masa Islam datang ke Indonsia, komunita Islam sanagat sedikit dan pemeluk Islam masih belum menegetahui tentang hal-hal yang berhubungan dengan hukum Islam. Bila timbul permasalahan, mereka menunjuk seseorang yag dipandang ahli untuk menyelesaikannya. Apapun keputusanyang akan dijatuhkan oleh orang yang ditunjuk itu keduanya harus taat untuk mematuhi. Cara seperi inilah yang disebut ‘tahkim’.¹⁹ Bertakim seperti ini dapat juga dilaksanakan dalam hal selain sengketa, seperti penyerahan pelaksanaan akad nikah dari wanita yang tidak mempunyai wali.

Orang yang ditunjuk sebagai hakim itu disebut *muhakkam* yang bertugas untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang timbul diantara mereka. Pada awal datangnya Islam ke Indonesia, *muhakkam* ini adalah orang yang menguasai ilmu pengetahuan secara luas yang dalam kehidpan sehari-hari disebut Ulama.

Setelah agama Islam berakar dalam masyarakat, peranan lama sangat menonjol. Mereka bertindak sebagai Guru dan pengawal hukum Islam. Dengan hal tersbut di ats dapat dipahami bahwa hakim pada periode awal Islam di nusantara ini adalah seorang ulama yang

¹⁹ Abdul manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Ed.1, Cet Ke-1, (Jakarta Timur: Kencana, 2010), h.207



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebarkan agama Islam, dipercaya dan ditunjuk oleh mereka yang bersengketa untuk menyelesaikan segala perselisihan yang mereka hadapi dan putusannya dilaksanakan sebagai hukum Islam.

b. Periode *al-Halli wa al-'Aqdi*²⁰

Setelah kelompok-kelompok masyarakat Islam terbentuk dan mampu mengatur tata kehidupan sendiri, pelaksanaan kekuasaan kehakiman dilaksanakan dengan jalan mengangkat kekuasaan kehakiman dilaksanakan dengan jalan mengangkat *al-Halli wa al-'Aqdi* yaitu orang-orang yang terpecaya dan luas pengetahuan untuk menjadi sesepuh masyarakat. Abdl Manan memberikan definisi *al-Halli wa al-'Aqdi* adalah pemimpin masyarakat yang diikuti dan dipercaya oleh umat, dapat diterima oleh semua pihak dengan ikhlas hati, penuh istiqamah, bertawakal, adil bijaksana, serta memiliki semangat untuk bekerja demi kepentingan umum. Selanjutnya *al-Halli wa al-'Aqdi* mengangkat para hakim untuk menyelesaikan segala sengketa yang ada di masyarakat.

c. Periode Tauliah²¹

Setelah terbentuknya kerajaan-kerajaan Islam di-Indonesia, pengangkatan hakim dilaksanakan dengan cara tauliah dari imam. Atau pelimpahan wewenang dari sultan selaku kepala negara. Kepala negara sebagai *Wali al-amri* mempunyai wewenang mengangkat orang-orang yang telah mempunyai syarat tertentu untuk menjadi hakim di wilayah

²⁰ *Ibid.* h.194

²¹ *Ibid.* h. 195.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerajaan yang ditentukan oleh kepala negara atau sultan. Pemberlakuan *tauliah* ini mulai diberlakukan pada 1282 M sebelum Marcopolo singgah di Peureulek pada 1292.

Bersamaan dengan perkembangan masyarakat Islam, ketika kedatangan orang-orang Belanda pada 1605 M, Indonesia sudah terdiri dari sejumlah kerajaan Islam. Dalam penerimaan agama Islam dalam Kerajaan, secara otomatis hakim melaksanakan peradilan diangkat langsung oleh sultan atau Imam. Pada periode ini kerajaan-kerajaan Islam nusantara sudah mempunyai pembantu jabatan agama dalam sistem pemerintahannya. Misalnya, di tingkat Desa ada ada jabatan agama yang disebut *kaum*, *kayim*, *Modin*, dan *Amil*. di tingkat kecamatan disebut *Pengulu Naib*. Di tingkat kabupaten ada *Penghulu seda* dan tingkat kerajaan disebut *Penghulu Agung* yang befungsi sebagai hakim atau (*qadhi*) yang dibantu beberapa penasihat yang kemudian disebut dengan *Pengadilan Serambi*.

d. Periode Kolonial

Pada masa kolonial, Peradilan Agama tersebar di daerah-daerah tempat berkedudukan Peradilan Gubernemen, di daerah-daerah yang menjadi bagian dari Peradilan Pribumi, atau di daerah-daerah swaparja dan menjadi bagian dari Peradilan swapraja. Pada 1642 oleh VOC, dinyatakan bahwa hukum kewarisan Islam berlaku bagi para pemeluk Agama Islam. Kemudian pada tahun 1760. Diselesaikan kompilasi hukum kekeluargaan Islam yang dikenal dengan *Compendium Freijer*.²²

²² *Ibid*, h. 212-214.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara yuridis formal, Peradilan Agama sebagai suatu badan peradilan yang terkait dalam sistem kenegaraan untuk pertama kali lahir di Indonesia (Jawa dan Madura) pada 1 Agustus 1882 berdasarkan keputusan Raja Belanda yakni Raja William III tanggal 19 Januari 1882 No. 24 yang dimuat dalam *staatblad* 1882 No. 152. Badan peradilan ini bernama *Priesterraden* yang kemudian lazim disebut dengan Rapat Agama atau Raad Agama dan terakhir disebut dengan Pengadilan Agama.

Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, nama Pengadilan Agama kemudian diganti menjadi *Sooyoo Hooiin*. Pengadilan Agama tersebut tetap memiliki fungsi yang sama selama di bawah penjajahan Jepang dengan masa Belanda.

e. Masa Kemerdekaan sampai Sekarang

Pada awal kemerdekaan, keberadaan Pengadilan Agama tidak terpengaruh dengan masalah politik di Indonesia mengingat pada masa itu Indonesia masih dalam proses merumuskan negara serta mempertahankan kemerdekaan dengan fisik serta adanya dalam Pasal II aturan peralihan UUD 1945 yang menyatakan: “segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini”.

Namun pada tahun 1948 bertepatan dengan keluarnya UU Nomor 19 Tahun 1948 tentang susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman dan kejaksanaan yang ditetapkan Wakil Presiden Mohammad Hatta dan Menteri Kehakiman Soesanto Tirtoprojo di Yogyakarta tanggal 18 Juni



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1948 dinyatakan bahwa susunan Pengadilan Agama sebelumnya dihapuskan dan digabungkan dalam Peradilan Umum. Hal ini kemudian memicu kemarahan masyarakat Indonesia khususnya yang berada di wilayah Sumatera.²³

Pada masa berikutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 98 UUD Sementara dan Pasal 1 ayat (4) UU Darurat Nomor 1 Tahun 1951, pemerintah mengeluarkan PP Nomor 45 Tahun 1957 tanggal 5 Oktober 1957, tentang pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa-Madura terutama daerah Aceh untuk memenuhi kehendak masyarakat setempat sekaligus untuk meredakan suasana keamanan dan ketertiban.

Selanjutnya, tahun 1970-an, Pengadilan Agama mengalami perubahan, terutama sejak diundangkan dan berlakunya UU No. 14 Tahun 1970 dan UU Nomor 1 Tahun 1974 serta Peraturan Pelaksanaannya. UU No. 14 Tahun 1970 mengundangkan: "susunan, kekuasaan dan acara dan badan-badan Peradilan Umum, Agama, Militer, dan Tata Usaha Negara" harus diatur dengan Undang-undang tersendiri. Dengan berlakunya UU No. 14 Tahun 1970 memberi tempat kepada PADI sebagai salah satu peradilan dalam tata peradilan di Indonesia yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁴

Ketentuan UU No. 14 Tahun 1970 tersebut merupakan awal proses penyusunan RUU-PA. Menurut prosedur yang telah ditetapkan dalam

²³ *Ibid.* h. 241-243.

²⁴ *Ibid.* h. 253

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

INPRES Nomor 15/1970 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI, terlebih dahulu harus diajukan permohonan izin prakarsa membuat rancangan undang-undang kepada presiden. Maka Menteri Agama K.H. Moh. Dachlan mengajukan permohonan membuat RUU tersebut kepada presiden dengan suratnya No. MA/242/197 Tanggal 31 Agustus 1971. RUU yang diajukan prakarsanya adalah tentang susunan dan kekuasaan serta acara Peradilan Agama.

Pada tanggal 13 Desember 1988, pemerintah menyampaikan RUU tentang Peradilan Agama (RUU-PA) ke DPR dengan amanat (surat) Presiden No. R-06/RU/XII/1988 yang isinya agar RUU-PA dibahas dan disetujui DPR serta menunjuk Menteri Agama sebagai wakil pemerintah.

Setelah dibahas secara mendalam dengan berbagai pro-kontra dari banyak kalangan, akhirnya pada Kamis tanggal 14 Desember 1989, Rancangan Undang-undang Peradilan Agama disetujui oleh DPR menjadi Undang-undang Republik Indonesia tentang Peradilan Agama. Kemudian pada tanggal 29 Desember 1989, undang-undang tersebut disahkan menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 oleh Presiden Republik Indonesia, diundangkan pada tanggal yang sama oleh Menteri Sekretaris Negara dan dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 49 Tahun 1989.

3. Dasar Hukum Peradilan

Peradilan memiliki dasar hukum yang bersumber dari firman Allah SWT, surat Shad [38] ayat 26, yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
 الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَظْلُمُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ
 عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, Karena mereka melupakan hari perhitungan.”²⁵

Firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah (5) ayat 49:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ
 عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ
 بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang Telah diturunkan Allah), Maka Ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.”²⁶

Dari kedua dalil di atas jelaslah bahwa sebenarnya peradilan merupakan kebutuhan yang telah di tetapkan dasr hukumnya melalui Al-qur'an.

²⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op. Cit*, Q.S Shad [38]: 26, h. 454.

²⁶ *Ibid*, Q.S Al-Maidah [5]ayat 49, h. 116.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Rukun Peradilan

Dalam peradilan terdapat rukun-rukun yang harus ditetapkan, yaitu:

- a. Hakim, yaitu orang yang diangkat oleh penguasa untuk menyelesaikan dakwaan-dakwaan, karena penguasa tidak mampu melaksanakan sendiri semua tugas itu.
- b. Hukum, yaitu suatu keputusan produk qadhi, untuk menyelesaikan perselisihan dan memutuskan persengketaan.
- c. Al-Mahkum bih, yaitu hak. Kalau pada qadha al-ilzam, yaitu penetapan qadhi atas tergugat, dengan memenuhi tuntutan penggugat apa yang menjadi haknya, sedangkan qadha al tarki (penolakan) penggugat yang berupa penolakan atas gugatannya.
- d. Al-Mahkum 'alaih, yaitu orang yang dijatuhi putusan atasnya.
- e. Al-Mahkum lah, yaitu penggugat suatu hak, yang merupakan hak manusia semata-mata.²⁷

B. Pengadilan Agama Pasir Pengaraian

1. Sejarah Pengadilan Agama Pasir Pengaraian

Pengadilan Agama Pasir Pengaraian berdiri pada tahun 1972. Berdirinya Pengadilan Agama Pasir Pengaraian berdasarkan surat Keputusan Menteri Agama RI No. 34 tahun 1972. Dalam surat keputusan tersebut disebutkan secara tegas “Menetapkan membentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’ah Pasir Pengaraian”.²⁸

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Alamin Patawari, *Mengakhiri Pengabdian Sebagai Hakim di Bumi Lancang Kuning*, (Pekanbaru : Yayasan Gahara Muda Sehati, 2019) h. 269

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketika awal berdirinya, Pengadilan Agama Pasir Pengaraian merupakan cabang dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pekanbaru. Pada saat itu Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dipimpin oleh Drs. H. Abbas Hasan. Drs. H. Selain bertindak sebagai ketua di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian definitive pada tanggal 28 Agustus 1975, ia juga menjabat sebagai ketua di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Sejak saat itu Pengadilan Agama Pasir Pengaraian telah melakukan tugasnya sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya seperti yang diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957. Untuk membantu pelaksanaan sehari-hari, ketua Drs. H. Abbas Hasan dibantu oleh beberapa orang tenaga Hakim Honorer masing-masing bernama M. Salaeh KUA, A. Jabal, Hasanuddin, Pakih Mukhtar dan M. Bakar. Ia juga dibantu oleh Panitera bernama Sorat M, yang dahulunya dari pegawai Kantor Departemen Agama Kabupaten Kampar pindah ke Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.²⁹

Dengan adanya pemekaran Kabupaten, maka lahirlah kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 12 Oktober 1999 dengan luas wilayah kurang lebih 7.449,85 km yang terdiri dari 16 (enam belas) kecamatan, 6 (enam) kelurahan dan 147 (seratus empat puluh tujuh) Desa dan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian masuk dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu, maka pada tahun 2004 Pengadilan Agama Pasir Pengaraian mendapatkan penambahan ruang bangunan yang semula 200 M² menjadi 640 M² dengan

²⁹*Ibid.* h. 270.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

luas tanah 1.200 M² yang terletak di jalan Diponegoro No. 10-11 Pasir pengaraian.

Saat ini aparaturnya Pengadilan Agama Pasir Pengaraian terdiri dari 15 orang, yaitu 3 orang Hakim termasuk Wakil Ketua. Bagian Kepaniteraan 8 orang, yaitu Panitera, Wakil Panitera, Panmud Hukum, dan Panmud Permohonan, 2 orang jurusita, dan 2 orang jurusita pengganti. Bagian kesekretarian 4 orang, yaitu sekretaris, kasubbag PTIP, kasubbag kepegawaian dan ortala, kasubbag keuangan dan umum.

2. Letak Geografis

Wilayah Pengadilan Agama Pasir Pengaraian yang berkedudukan di Jl. Diponegoro No. 10 - 11, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu. Secara Geografis Kabupaten Rokan Hulu memiliki wilayah yang terdiri dari 85% daratan dan 15% daerah perairan dan rawa. Secara Geografis Kabupaten berbatasan sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara dengan kabupaten Padang Lawas Utara dan kabupaten Labuhan batu
- b. Sebelah Timur dengan kabupaten Bengkalis dan kabupaten Rokan Hilir
- c. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Kampar
- d. Sebelah Barat dengan Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat

Adapun Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, mencakup seluruh wilayah Kabupaten Rokan Hulu yang meliputi 16 (enam belas) Kecamatan terdiri dari 154 Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Pasir Pengaraian yang Agung³⁰

b. Misi

- a) Meningkatkan Profesionalitas aparatur Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;
- b) Mewujudkan manajemen Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;
- c) Meningkatkan Akses masyarakat terhadap Pengadilan Agama Pasir Pengaraian ;
- d) Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengadilan Agama.

5. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015, tanggal 7 Oktober 2015 Tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, terjadinya pemisahan antara Panitera dan Sekretaris. Panitera membawahi Panmud Hukum, Panmud Gugatan, Panmud Permohonan, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti. Sedangkan Sekretaris membawahi Kasubbag PTIP, Kasubbag Kepegawaian dan Ortala, dan Kasubbag Keuangan dan Umum.

Aparatur Pengadilan Agama Pasir Pengaraian terdiri dari 15 orang, yaitu 3 orang Hakim termasuk Wakil Ketua. Bagian Kepaniteraan 8 orang, yaitu Panitera, Wakil Panitera, Panmud Hukum, dan Panmud Permohonan, 2 orang jurusita, dan 2 orang jurusita pengganti. Bagian Kesekretariatan 4

³⁰ <https://www.ss.pa-pasirpengaraian.go.id>

orang, yaitu Sekretaris, Kasubbag PTIP, Kasubbag Kepegawaian dan Ortala, Kasubbag Keuangan dan Umum,³¹ sebagaimana tergambar di bawah ini:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³¹ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, 2018



© Hak

milik UIN Suska Riau

State Islam

versity of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

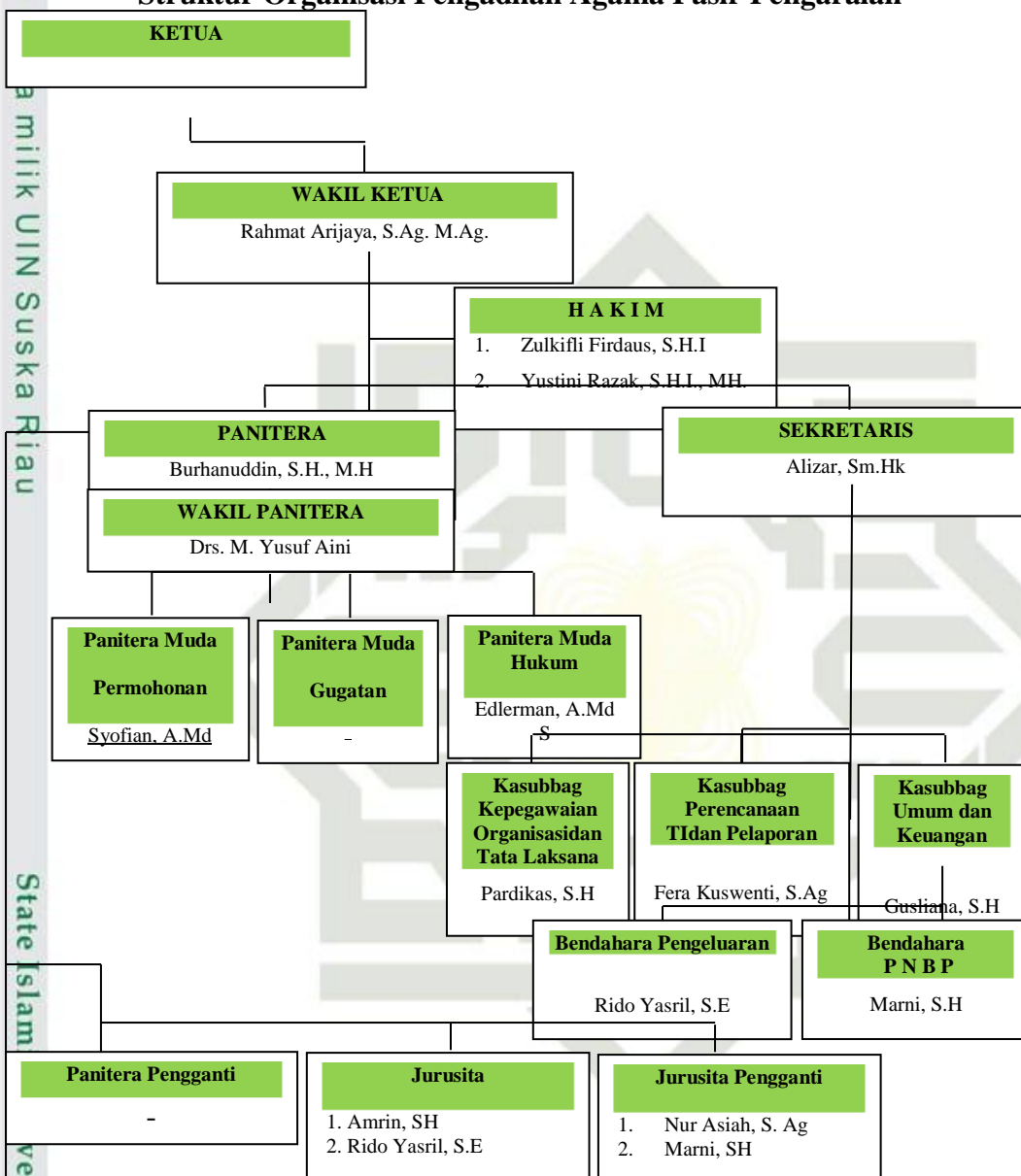
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pasir Pengaraian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan putusnya perkawinan antar suami-istri dalam hubungan keluarga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perceraian berarti perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata *bercerai* itu sendiri berarti “menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami istri.”³²

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 207 dijelaskan bahwa perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam undang-undang.³³

Kata “cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti : pisah, putus hubungan sebagai suami istri, talak. Kemudian kata perceraian mengandung arti perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri), perpecahan. Adapun kata bercerai berarti : tidak bercampur (berhubungan, bersatu, dsb) lagi, berhenti berlaki bini (suami istri).³⁴

Istilah “perceraian” terdapat dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan falkultatif bahwa “Perkawinan dapat putus karena

³² Tim Pandom Media, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta: Pandom Media Nusantara, 2014), Cet. Ke-1, h. 156

³³ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Kitab Lengaap KUHper, KUHAper, KUHP, KUHP, KUHD*, (Jakarta Selatan: Penerbit Pustaka Yustisia, 2012), Cet, Ke-2, h., 873.

³⁴ Muhammad Syaifuddin, *Op. Cit*, h. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.”³⁵ Dalam Pasal 38 dan Pasal 39³⁶ UU Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa :

1. Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) diikrarkan di depan sidang Pengadilan Agama.
2. Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.³⁷

Talak berasal dari Bahasa Arab yaitu kata *اطلاق* berarti melepaskan tali dan kebebasan, meninggalkan, memutuskan ikatan atau lepasnya ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.³⁸ Talak

³⁵ Muhammad Amin Suma, *Op. Cit*, h. 530.

³⁶ Bunyi Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut :

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri. Lihat : *Ibid*.

³⁷ Muhammad Syaifuddin, *Op. Cit*, h. 15., h., 19-20.

³⁸ Said bin Abdullah bin Thalib al Hamdani, *Risalah Nikah*, terj, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), h. 202. Lihat juga : Tihami dan Sohari Sahrani, *Op. Cit*, h. 229. Lihat juga : Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat : Khitbah, Nikah dan Talak*, terj, (Jakarta : Amzah, 2015), h. 255. Lihat juga : Sulaiman Ahmad Yahya al Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, terj, Cet 3, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2015), h. 499. Lihat juga : Abdul Rahman Ghazali, *Op. Cit*, h. 191.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut bahasa adalah melepaskan ikatan secara mutlak, baik berupa ikatan secara materil maupun imperial.³⁹ Dikatakan dalam ungkapan, “*Athlaqtu al-asir, idza hallatu qaidau wa arsaltuhu*” (aku melepaskan tawanan, jika aku melepaskan ikatannya dan membiarkannya pergi).⁴⁰

Menurut istilah syara⁴¹, talak yaitu:

حَلَّ رِبْطَةِ الزَّوْجِ وَاجٍ وَإِنْهَاءُ الْعَلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

“Melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.”

Talak (perceraian) secara bahasa berarti pemutusan ikatan. Sedangkan menurut istilah talak berarti pemutusan tali perkawinan.⁴² Talak merupakan pemutusan tali pernikahan yang mengikat antara suami dengan istrinya.⁴³

Al-Jaziry mendefinisikan:

الطَّلَاقُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ تَقْصَانُ حَلِّهِ بِلَفْظٍ مَخْصُوصٍ

“Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata.”⁴⁴

Menurut Abu Zakariya al-Anshari,⁴⁵ talak ialah:

³⁹ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Surakarta : Era Intermedia, 2005), h.310

⁴⁰ Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Op. Cit.*

⁴¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2012), Cet Ke-6, h.191.

⁴² Syaikh Kamil Muhammad, ‘Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2007), h. 427

⁴³ Ibnu Qadamah, Al Mughni, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2013), h. 223

⁴⁴ *Ibid.*, h. 192

⁴⁵ Zakaria bin Muhammad bin Ahmad bin Zakaria al-Anshari as-Sunaiki (bahasa Arab: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري السُنَيْكِي) (lahir 1420/823 H di Sunaikh, Mesir Timur,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَلَّ عَقْدَ النِّكَاحِ بِإِفْظِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ

“Melepas tali akad nikah dengan kata talak dan semacamnya.”⁴⁶

Menurut Sayyid Sabiq,⁴⁷ perceraian (talak) menurut syara’ adalah melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami istri⁴⁸. Menurut Imam Syafi’i⁴⁹, talak menurut istilah artinya melepaskan ikatan perkawinan (nikah).

Dalam buku Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 17 disebutkan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

Ditinjau dari segi kemaslahatan atau kemudharatannya, maka hukum talak ada lima.⁵⁰

wafat 1520/926 H di Kairo, pada usia 100 tahun) adalah seorang Qadi, Ulama mazhab Syafi’i dalam bidang hadis, fikih dan tafsir. Ibunya mengirimnya ke Syaikh ar-Rabi’ bin al-Mushthalam as-Sulami di Al-Azhar setelah ayahnya wafat, dan ia menuntut ilmu sejak usia muda. Lihat : https://id.wikipedia.org/wiki/Zakaria_al-Anshari diakses pada tanggal 3 Desember 2019 pukul 20.37 WIB.

⁴⁶Ibid., h. 192

⁴⁷ Nama lengkapnya adalah Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihamiy. Sayyid Sabiq lahir di di Istana, Distrik al-Bagur, Propinsi al-Munufiah, Mesir, tahun 1915. Ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang fikih dan dakwah Islam, terutama melalui karyanya yang monumental, *Fikih as-Sunnah* (Fikih Berdasarkan Sunah Nabi). Lihat : <https://www.referensi.makalah.com/2012/11/biografi-sayyid-sabiq.html> diakses pada tanggal 3 Desember 2019 pukul 20.39 WIB.

⁴⁸ Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Op. Cit*, h., 412.

⁴⁹ Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi’i al-Muththalibi al-Qurasyi (Arab: أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المظلي القرشي) atau singkatnya Imam Asy-Syafi’i (Ashkelon, Gaza, Palestina, 150 H/767 M - Fusthat, Mesir, 204 H/819 M) adalah seorang muftibesar *Sunni* Islam dan juga pendiri mazhab Syafi’i. Imam Syafi’i juga tergolong kerabat dari Rasulullah, ia termasuk dalam Bani Muththalib, yaitu keturunan dari al-Muththalib, saudara dari Hasyim, yang merupakan kakek Muhammad. Lihat : Imam Syafi’i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Al Umm*, Terj, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h., 3.

⁵⁰ Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, Terj, Cet, Ke-1, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2001), h., 208-210.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Wajib

Apabila terjadi perselisihan di antara suami istri dan tidak ada jalan yang dapat ditempuh kecuali dengan mendatangkan dua orang hakim yang mengurus perkara keduanya. Jika kedua orang hakim tersebut memandang bahwa perceraian lebih baik bagi keduanya, maka saat itulah talak menjadi wajib.⁵¹

2) Makruh

Yaitu talak yang dilakukan tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan.

3) Mubah

Yaitu talak yang dilakukan karena adanya kebutuhan seperti akhlak istri yang buruk yang kemudian menjauhkan mereka dari tujuan pernikahan.

4) Sunnah

Yaitu talak yang dilakukan pada saat istri mengabaikan hak-hak Allah SWT yang telah diwajibkan kepadanya, sedangkan suami sudah tidak sanggup lagi memaksanya.

5) Mahzhur (terlarang).

Yaitu talak yang dilakukan ketika istri sedang haid. Para ulama di Mesir telah sepakat untuk mengharamkannya. Talak ini juga disebut dengan talak *bid'ah* karena suami yang menceraikannya itu telah menyalahi sunnah Rasul dan mengabaikan perintah Allah SWT.

⁵¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet. Ke-40, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), h.,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dalil Kehujjahan Talak

- a. Q.S Al-Baqarah [2] : 229

الطَّلَقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik....”⁵²

- b. Q.S At-Thalaq [65] : (1)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan Istri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah...”⁵³

- c. Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim

حديث ابن عمر عن يونس بن جبير، قال: سألت ابن عمر؛ فقال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يرجعها، ثم يطلق من قبل عدتها؛ قلت: فتعتد بتلك التطليقة قال: أرايت إن عجز واستحَمَقَ

Artinya : “Yunus bin Jubair berkata: Saya bertanya kepada Ibn Umar r.a., maka jawabnya: Ibnu Umar r.a. telah menceraikan isterinya ketika sedang haidh, maka Umar r.a. tanya kepada Nabi saw. dan oleh Nabi saw. disuruh kembari kepada isteri yang dicerai, kemudian dicerainya ketika akan menjalani iddahnya. Aku bertanya: Bagaimana jika tidak dapat kembali dan berkeras kepala.”⁵⁴

⁵² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op. Cit*, Q.S Al-Baqarah [2] : 229, h. 36.

⁵³ *Ibid*, Q.S At-Thalaq [65]: 1, h. 558.

⁵⁴ Muhammad Fu'ad Adbu Baqi, *al-Lu'lu' wal Marjan (Koleksi Hadits Yang Disepakati oleh al-Bukhari dan Muslim)*, Hadits Riwayat Bukhari, no. 68, Kitab Talaq, Bab 45 Haram Menceraikan Wanita dalam Haidh, (Semarang : al-Ridha, 1414 H), h. 206 Hadits No. 937.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Hadist Riwayat Abu Daud dan Ibn Majah; *shahih* menurut al-Hakim. Abu Hatim menilainya *mursal*

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْعَضُ الْحَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ
Artinya : “Dari Ibn ‘Umar Ra : Rasulullah Saw Bersabda, “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah talak.”⁵⁵

3. Rukun dan Syarat Talak

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud, rukun talak ada empat, sebagai berikut:

1. Suami. Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya.oleh karena itu talak menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah.⁵⁶

Untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan:

- a) Berakal sehat, suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak, yang dimaksud gila disini ialah hilan akalatau rusak karena sakit, termasuk kedalamannya *sakit pitam*, hilang akal karena sakit panas atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya.
- b) Baligh, talak yang dijatuhkan anank kecil dinyatakan tidak sah, sekalipun dia telah pandai demikian kesepakatan para ulama

⁵⁵ Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Bulughul Maram*, Kitab Nikah, Bab Talak, Hadits Nomor 956.Cet, 1, Terj, (Bandung: Marja, 2018), h., 209.

⁵⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Op. Cit*, h., 201

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mazhab, kecuali hambali. Ulama mazdhab Hambali mengatakan bahwa, talak yang dijatuhkan anak kecil yang mengerti dinyatakan sah, sekalipun usianya belum mencapai sepuluh tahun.

- c) Atas hendak sendiri, yang dimaksud dengan kehendak sendiri ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak bukan karena paksaan. Kesepakatan para ulama mazhab kecuali Hanafi mengatakan talak yang dijatuhkan karena terpaksa dinyatakan sah Mahkamah Syariah Mesir memberlakukan keputusan yang dinyatakan tidak berlaku talak yang dijatuhkan orang mabuk dan orang yang terpaksa.
2. Istri. Masing-masing suami berhak menjatuhkan talak terhadap istri sendiri. Tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain.⁵⁷

Untuk sahnya talak, bagi istri yang ditalak disyaratkan sebagai berikut:

- 1) Istri itu masih tetap dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalin masa *iddah* kekuasaan talak raj'i dari suaminya oleh hukum islam dipandang masih dalam perlindungan kekuasaan suami. Karenanya bila dalam masa itu suami menjatuhkan talak lagi, dipandang jatuh talaknya sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami. dalam hal talak ba'in, bekas suami tidak berhak menjatuhkan talak lagi terhadap bekas istrinya meski dalam masa *iddahnya*, karena

⁵⁷*Ibid.*, h., 203

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan talak bain itu bekas istri tidak lagi berada dalam perlindungan kekuasaan bekas suami.

- 2) Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah. Jika ia menjadi istri dengan akad nikah yang batil, seperti akad nikah terhadap wanita dalam masa *iddah*-nya, atau akad nikah dengan perempuan saudara istrinya (memadu antara dua perempuan bersaudara) atau akad nikah dengan anak tirinya itu.
- 3) *Shigat Talak*.⁵⁸
Shigat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjuk talak, baik itu *sharih* (jelas) maupun *kinayah*⁵⁹ (sindiran), baik berupa ucapan lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.
- 4) *Qashdu* (Sengaja), artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkan untuk talak, bukan untuk maksud lain.

4. Hikmah Terjadinya Perceraian

Pada prinsipnya, kehidupan rumah tangga harus didasari oleh sakinah, mawaddah, warahmah dan cinta kasih, yaitu suami istri harus memerankan peran masing-masing, yaitu satu sama lain saling

⁵⁸ *Ibid.*, h., 204.

⁵⁹ Kinayah adalah lafadz yang disampaikan dan yang dimaksud adalah kelaziman maknanya, di samping itu boleh juga yang dimaksud pada makna yang sebenarnya. <https://hahuwa.blogspot.com/2017/09/pengertian-kinayah-dan-macam-macamnya.html> diakses pada tanggal 3 Desember 2019 pukul 21.14 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melengkapi. Di samping itu juga harus mewujudkan keagamaan keeratan, kelembutan dan saling pengertian satu dengan yang lain sehingga rumah tangga menjadi hal yang sangat menyenangkan, penuh kebahagiaan, kenikmatan melahirkan generasi baik yang merasakan kebahagiaan yang diirasakan oleh orang tua mereka.⁶⁰

Jika mata air cinta dan kasih sayang sudah kering dan tidak lagi memancarkan airnya, sehingga hati salah satu pihak atau keduanya (suami istri) sudah tidak lagi merasakan cinta kasih, lalu kedua-duanya sudah tidak lagi memperdulikan satu dengan yang lainnya serta tidak lagi menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing, sehingga yang tinggal hanyalah pertengkaran dan tipu daya. Kemudian keduanya berusaha memperbaiki, namun tidak ada hasil, begitu juga keluarga telah berusaha melakukan perbaikan, namun tak kunjung berhasil pula, maka saat itu, talak adalah kata paling tepat namun ia merupakan obat yang paling terakhir diminum.⁶¹

Seandainya Islam tidak memberikan jalan menuju talak bagi suami istri dan tidak memperbolehkan mereka bercerai pada saat yang sangat kritis, hal itu akan membahayakan bagi pasangan tersebut. Mereka akan merasakan kehidupan rumah tangga mereka seperti neraka dan penjara yang berisi siksaan dan penderitaan. Dan hal itu, akan berakibat buruk terhadap anak-anak dan bahkan mempengaruhi kehidupan mereka. Karena, pasangan suami istri mengalami kegoncangan, maka anak-anak

⁶⁰ Hasan Ayyub, *Op. Cit*, h. 205.

⁶¹ *Ibid*, h. 205.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka akan menderita dan menjadi korban dari mereka akan lahir masyarakat yang dipenuhi dengan kedengkian, iri hati, kezaliman, hidup berfoya-foya dan berbuat hal-hal yang negatif sebagai bentuk pelampiasan dan pelarian diri dari kenyataan hidup yang mereka alami.⁶² Pada saat itu, talak merupakan satu-satunya jalan yang paling selamat. Talak merupakan pintu rahmat yang selalu dibuka bagi setiap orang dengan tujuan agar tiap-tiap suami istri mau introspeksi diri dan memperbaiki kekurangan dan kesalahan.⁶³

5. Macam-Macam Talak

Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak⁶⁴ itu, maka talak dibagi menjadi tiga macam, sebagai berikut:

- a. Talak *Sunni*, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah. Dikatakan talak *Sunni* jika memenuhi empat syarat:
 - 1) Istri yang ditalak sudah pernah digauli, bila talak dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli, tidak termasuk talak *sunni*.
 - 2) Istri dapat segera melakukan *iddah* suci setelah ditalak, yaitu dalam keadaan suci dari haid. Menurut Ulama Syafiiyah, perhitungan *iddah* bagi wanita berhaid ialah tiga kali suci, bukan tiga kali haid. Talak terhadap istri yang telah lepas haid (menopause) atau belum pernah haid, atau sedang hamil, atau talak karena suami meminta tebusan (*khulu'*), atau ketika istri dalam haid, semuanya tidak termasuk talak *sunni*.

⁶³ *Ibid*, h. 207.

⁶⁴ *Ibid*, h. 206.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, baik di permulaan, di pertengahan maupun di akhir suci, kendati beberapa saat lalu datang haid.
- 4) Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci di mana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak *sunni*.
- b. Talak *bid'i*, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntutan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak *sunni*. Termasuk talak *bid'i* ialah:
 - 1) Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu haid (menstruasi), baik di permulaan haid maupun di pertengahannya.
 - 2) Talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci dimaksud.
 - 3) Talak *la sunni wala bid'i*, yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak *sunni* dan tidak pula termasuk talak *bid'i*, yaitu:
 - a. Talak yang tidak dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli.
 - b. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid, atau istri yang telah lepas haid.
 - c. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil

Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan talak, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Talak *sharih* (terang)⁶⁵, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa kata-kata yang dipergunakan untuk talak *sharih* ada tiga, yaitu talak, *firaq* dan *sarah*,⁶⁶ ketiga ayat itu disebut dalam Al-Qur'an dan hadits.

al-Zhahiriyah⁶⁷ berkata bahwa talak tidak jatuh kecuali dengan mempergunakan salah satu dari tiga kata tersebut, karena syara' telah mempergunakan kata-kata ini, padahal talak adalah perbuatan ibadah, karenanya diisyaratkan mempergunakan kata-kata yang telah ditetapkan oleh syara'. Beberapa contoh talak *sharih* ialah seperti suami berkata kepada istrinya:

- 1) Engkau saya talak sekarang juga. Engkau saya cerai sekarang juga.
- 2) Saya *firaq* sekarang juga. Engkau saya pisahkan sekarang juga.

⁶⁵ Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Bina Iman, tt), Cet Ke-2, h. 175.

⁶⁶ Talak. *Firaq* dan *sarah* secara umum dalam Bahasa Arab memiliki arti yang sama yakni perpisahan. Lihat : <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/perpisahan/?c=Umum> diakses pada tanggal 3 Desember 2019 pukul 21. 03.

⁶⁷ Al-Zhahiriyah atau yang dikenal juga dengan Mazhab Zhahiri (Arab: ظاهري ; Literal) adalah salah satu mazhab fikih dan akidah dalam lingkup ahlus sunnah yang mencapai masa jayanya semenjak abad ke-3 hingga ke-8 H. Pengikut mazhab ini mengimani secara harfiah ayat-ayat Al-Quran dan Hadits sebagai satu-satunya sumber hukum Islam. Keyakinan mazhab ini menolak adanya permissalan (*Qiyas*) dan pemikiran pribadi (*Ra'y*) sebagai bagian dari sumber hukum fikih. Selain itu juga tidak menganggap fungsi konsensus Ijma'). Dalam bidang akidah, keyakinan mazhab ini hanya menyifati Allah menurut dengan apa yang ada dan tertulis jelas dalam Al-Qur'an saja dan menolak dengan keras praktik antropomorfisme (Penyerupaan /*Tasbih*). Praktik pendekatan tradisi Islam ini diperkirakan dimulai di Irak pada abad ke-9 M (ke-3 H) oleh Dawud bin Khalaf (w. 883 M). Lihat : https://id.wikipedia.org/wiki/Mazhab_Zhahiri diakses pada tanggal 3 Desember 2019 pukul 20.14 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Engkau saya sarah sekarang juga. Engkau saya lepas sekarang juga.

b. Talak *kinayah*, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata sindiran atau samar-samar, seperti suami berkata kepada istrinya:

- 1) Engkau sekarang telah jauh dari diriku
- 2) Selesaikan sendiri segala urusanmu
- 3) Janganlah engkau mendekatiku lagi
- 4) Keluarlah engkau dari rumah ini sekarang juga
- 5) Pulanglah engkau pulang ke rumahmu.⁶⁸

Ucapan-ucapan tersebut mengandung kemungkinan cerai dan mengandung kemungkinan lain. Tentang kedudukan talak dengan kata-kata *kinayah* atau sindiran ini sebagaimana dikemukakan oleh Taqiyudin Al-Husaini, bergantung kepada niat suami. Artinya, jika suami dengan kata-kata tersebut bermaksud menjatuhkan talak, maka menjadi jatuhlah talak itu, dan jika suami dengan kata-kata tersebut tidak bermaksud menjatuhkan talak maka talak tidak jatuh.

Ditinjau dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan bekas suami merujuk kembali bekas istri, maka talak dibagi dua macam:

- a. Talak *raj'i* yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang telah pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari istri, talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya.⁶⁹

⁶⁸ Sulaiman Rasjid, h., 403.

⁶⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Op. Cit*, h., 196.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. As-Siba'i⁷⁰ mengatakan bahwa talak *raj'i* adalah talak yang untuk kembalinya bekas istri kepada bekas suaminya tidak memerlukan pembaruan akad niah, tidak memerlukan mahar, serta tidak memerlukan persaksian.

Setelah terjadi talak *raj'i* maka istri wajib ber-*iddah*, hanya bila kemudian suami hendak kembali kepada bekas isrti sebelum berakhir masa *iddah*, maka hal itu dapat dilakukan dengan menyatakan rujuk, tetapi jika dalam masa *iddah* tersebut bekas suami tidak menyatakan rujuk terhadap bekas istrinya, maka dengan berakhirnya masa *iddah* itu kedudukan talak menjadi talaak *ba'in*; kemudian jika sesudah berakhirnya masa *iddah* iu suami ingin kembali kepada bekas istrinya maka wajib dilakukan dengan akad nikah baru dan dengan mahar yang baru pula.

Talak *raj'i* hanya terjadi pada talak pertama dan kedua saja, berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. (Q.S Al-Baqarah [2] : 229)⁷¹

⁷⁰ Syekh Musthafa As Siba'i nama lengkapnya adalah Syekh. DR.Musthafa Husni As Siba'i dengan panggilan Abu Hasan, lahir di kota Himsh, Suriah, tahun 1915. Beliau anak dari seorang ulama, mujahid dan khatib yang terkenal di masjid Jami' Himsh, Syekh Husni As Siba'i. Pada tahun 1933, Musthafa As Siba'i pergi ke Mesir untuk menuntut ilmu di Universitas Al-Azhar. <https://www.erasmuslim.com/berita/silaturrehman/syekh-as-siba-i-pejuang-palestina-dari-suriah.htm#.XeZpBugzblU> diakses pada tanggal 3 Desember 2019 pukul 20.39 WIB.

⁷¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op. Cit*, Q.S Al-Baqarah [2] : 229, h. 36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat ini memberikan makna bahwa talak yang disyariatkan Allah ialah talak yang dijatuhkan oleh suami satu demi satu, tidak sekaligus, dan bahwa suami boleh memelihara kembali bekas istrinya setelah talak pertama dengan cara yang baik, demikian pula setelah talak kedua. Arti memelihara kembali ialah dengan mewujudkan dengan mengembalikannya ke dalam ikatan perkawinan dan berhak mengumpuli dan mempergaulinya dengan cara yang baik. Hak merujuk hanya terdapat dalam talak *raj'i* saja.

- b. Talak *Ba'in*, yaitu talak yang tidak memberikan hak merujuk bekas suami terhadap bekas istrinya. Untuk mengembalikan bekas istri ke dalam kaitan perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad nikah yang baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.⁷²

Talak *ba'in* ada dua macam, yaitu talak *bain shugra* dan talak *bai'n kubra*.

- 1) Talak *ba'in Shugra* ialah talak *ba'in* yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istri. Artinya bekas suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas istri, baik dalam masa *iddah*-nya maupun sudah berakhir masa *iddah*-nya.
- 2) Talak *ba'in kubra*, yaitu talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali bekas istrinya, kecuali setelah bekas istri itu

⁷² Abdul Rahman Ghazali, h., 198, lihat juga Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum keluarga Sakinah*, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), h., 380

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan *iddah*-nya. Talak *ba'in kubra* terjadi pada talak yang ketiga. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah [2] ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ...

Artinya : “Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya, sampai dia kawin dengan suami yang lain...”⁷³

Ditinjau dari segi cara suami menyampaikan talak kepada istrinya, talak ada beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Talak dengan ucapan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan di hadapan istrinya dan istri mendengar secara langsung ucapan suaminya itu.
- b. Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan oleh istrinya, kemudian istri membaca dan memahami isi dan maksudnya. Talak yang dinyatakan tertulis dapat diapandang jatuh (sah), meski yang bersangkutan dapat mengucapkannya. Sebagaimana talak dengan ucapan ada talak sharih dan talak kinayah, maka talak dengan tulisan pun demikian pula. Talak sharih jatuh dengan semata-mata pernyataan talak, sedangkan talak kinayah bergantung kepada niat suami.
- c. Talak dengan isyarat, yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara. Isyarat bagi suami yang tuna wicara

⁷³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op. Cit*, Q.S Al-Baqarah [2] : 230, h. 36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(bisu) dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dan menyampaikan maksud dan isi hati. Oleh karena itu, isyarat baginya sama dengan ucapan bagi yang dapat berbicara dalam menjatuhkan talak, sepanjang isyarat itu jelas dan meyakinkan bermaksud talak, atau mengakhiri perkawinan, dan isyarat itulah satu-satunya jalan untuk menyampaikan maksud yang terkandung dalam hatinya.

Sebagaimana fuqaha mengatakan bahwa untuk sahnya talak dengan isyarat bagi orang yang tuna wicara itu ia adalah buta huruf. Jika yang bersangkutan mengenal tulisan dan dapat menulis, maka talak baginya tidak cukup dengan isyarat, karena tulisan itu lebih dapat menunjuk maksud ketimbang isyarat, dan tidak beralih dari tulisan ke isyarat, kecuali karena darurat, yakni tidak dapat menulis.

- d. Talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya melalui perantara orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami itu kepada istrinya yang tidak berada dihadapan suami bahwa suami mentalak istrinya. Dalam hal ini utusan berkedudukan sebagai wakil suami untuk menjatuhkan talak suami dan melaksanakan talak itu.

6. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

Secara umum, faktor penyebab terjadinya perceraian adalah sebagai berikut :

- a. Tidak adanya kecintaan suami istri⁷⁴

⁷⁴ Khalid Al-Husainan, *Fikih Wanita 1001 Problema Wanita*, (Jakarta: Darul Haq, 2014), h. 210

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Tidak dilaksanakannya hak-hak suami istri, dilakukannya perbuatan maksiat oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak.⁷⁵
- c. Tidak ditempuhkan cara yang bijaksana dalam pergaulan antara keduanya ketika terjadi problem
- d. Sang istri tidak memperhatikan masalah kebersihan, tidak berhias untuk suaminya dengan pakaian, wewangian, perkataan dan keceriaan pada saat berjumpa dan bersama.⁷⁶

Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 38 huruf b dijelaskan bahwa putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian dan putusan pengadilan.⁷⁷

7. Akibat Putusnya Perkawinan

Dalam pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena: (a) kematian (b) perceraian, dan (c) atas keputusan pengadilan.

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 41 UUP:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bilamana perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.
- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan

⁷⁵ *Ibid*, h., 210.

⁷⁶ *Ibid*, h. 211.

⁷⁷ Muhammad Amin Suma, *Loc. Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bekas istrinya.⁷⁸

Menurut ketentuan Pasal 149 kompilasi hukum Islam⁷⁹ menjelaskan mengenai akibat dari putusnya perkawinan disebabkan oleh cerai talak adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhul*.
- b. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* dan *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al-dukhul*.
- d. Memberi biaya pada *hadlanah* (pemeliharaan, termasuk di dalamnya biaya pendidikan) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.⁸⁰

Ketentuan tersebut dirujuk dari firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah [2]: 236

⁷⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.

⁷⁹ Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam* h., 49

⁸⁰ *Ibid*, h. 234.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى
الْحَسَنِينَ ﴿٦٥﴾

Artinya : Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.⁸¹

Pasal 151 KHI menyatakan: “Bekas istri selama masa iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain”.⁸² Karena pada hakikatnya istri selama dalam masa iddah, masih dalam ikatan nikah dengan suaminya.⁸³ Firman Allah dalam Q.S At-Thalaq [65] ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ
يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ

Artinya: “Hai nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang...”⁸⁴

⁸¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op. Cit*, Q.S Al-Baqarah [2] : 236, h. 38.

⁸² Muhammad Amin Suma, *Op. Cit*, 600.

⁸³ Ibid, h. 226

⁸⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op. Cit*, Q.S At-Thalaq [65]: 1, h. 558.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Tata Cara Cerai Talak di Indonesia

1. Pendaftaran Permohonan Cerai Talak

Dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA) menyatakan :

- 1) Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.
- 2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.
- 3) Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.
- 4) Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman diluar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
- 5) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.⁸⁵

Dalam rumusan Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan tentang perceraian beserta pengadilan tempat permohonan itu diajukan:

⁸⁵Ahmad Rofiq, *Op. Cit*, h. 233-234.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”⁸⁶

Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 di atas memuat:

- a. Nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami dan termohon, yaitu istri.
- b. Alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak terdapat dalam Pasal 19 PP Nomor 9/1975 jo. Pasal 116 KHI.⁸⁷

Alasan-alasan tersebut meliputi :

1. Salah satu pihak tersebut berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

⁸⁶ *Ibid*, h. 233. Lihat juga : Muhammad Amin Suma, *Op. Cit*, h., 600.

⁸⁷ *Ibid*, h. 234.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Salah satu mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik-talak;
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁸⁸

2. Pemeriksaan dan Penetapan Perkara Cerai Talak Oleh Pengadilan Agama

Dalam Pasal 68 UUPA menyebutkan :

- a. Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di Kepaniteraan.
- b. Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup.⁸⁹

Dalam rumusan Pasal 15 PP Nomor 9/1975 dan Pasal 131 ayat 1 KHI dinyatakan: “Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang dimaksud Pasal 14, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim surat dan juga istrinya untuk meminta

⁸⁸ Muhammad Amin Suma, *Op. Cit*, h. 593. Lihat Juga : Mardani, *Hukum Islam : Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 104-105.

⁸⁹ Muhammad Amin Suma, *Op. Cit*, h., 453.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian.”⁹⁰

Usaha mendamaikan kedua belah pihak selain ditempuh sebelum persidangan dimulai, setiap kali persidangan tidak tertutup kemungkinannya untuk mendamaikan mereka. Karena biasanya persidangan semacam ini, tidak bisa diselesaikan dalam sekali persidangan.

Pasal 28 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Agama menjelaskan :

“Pengadilan Agama setelah mendapat penjelasan tentang maksud talak itu, berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan dapat meminta bantuan kepada Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) setempat agar kepada suami istri dinasihatikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Pengadilan Agama setelah memerhatikan hasil usaha BP4 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan, dan berpendapat adanya alasan untuk talak maka diadakan sidang untuk menyaksikan talak dimaksud.”⁹¹

Langkah berikutnya, diatur dalam Pasal 70 UUPA sebagaimana dirinci dalam Pasal PP 16 Nomor 9/1975:

- a. Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian maka pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.
- b. Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), istri dapat mengajukan banding.
- c. Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan

⁹⁰ *Ibid*, h., 550 dan 595.

⁹¹ *Ibid*, h., 645.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.

- d. Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang tidak memberi khusus dalam suatu akta autentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya.
 - e. Jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau patut tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya.
 - f. Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.⁹²
- Ini berarti bahwa perkawinan mereka tetap utuh di mata hukum positif Indonesia. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 131 ayat (2), (3) dan(4).

Selanjutnya dalam Pasal 17 PP Nomor 9/1975 menyatakan :

“Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 16, ketua pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian”⁹³

⁹² *Ibid*, h., 453 dan 551.

⁹³ *Ibid*, h., 551.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Putusan Hakim

Dalam acara perdata, putusan Hakim itu cukup dengan mendasarkan diri kepada kebenaran formal saja (akta tertulis, dll).⁹⁴ Putusan hakim adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan.

Apabila seseorang berperkara di Pengadilan, mereka pasti memiliki tujuan tertentu, terutama di dalam Acara perkara perdata. Tujuan mereka; baik penggugat maupun tergugat adalah untuk mendapatkan putusan dari pengadilan melalui Hakim, akan tetapi perlu dipahami bahwa tujuan antara penggugat dan tergugat selalu berbeda demi kepentingan mereka masing-masing. Penggugat menghendaki agar gugatannya dikabulkan, sedangkan tergugat menghendaki agar gugatan yang ditujukan kepadanya ditolak.⁹⁵

Menurut UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 17 dinyatakan bahwa “Sidang memeriksa Pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali apabila Undang-undang menentukan lain.” Ketentuan ini menjamin adanya kontrol sosial atas proses peradilan terutama tugas-tugas yang dilaksanakan oleh para penegak hukum.

Asas yang universal di dalam pemeriksaan perkara perdata yakni agar supaya Hakim dapat mengambil keputusan yang tepat, seyogyanya terlebih dahulu mendengar kedua belah pihak. Asas ini mengandung arti bahwa

⁹⁴ Sudarsono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h.,

⁹⁵ *Ibid*, h., 94-95.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemeriksaan berjalan secara lisan sehingga Hakim dapat mendengar kedua belah pihak; adapun proses verbalnya disusun oleh panitera pengadilan.⁹⁶

R. Soepomo menjelaskan, “tugas Hakim ialah menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi perkara itu benar-benar ada atau tidak. Hubungan hukum inilah harus terbukti di muka Hakim dan tugas kedua belah pihak yang berperkara ialah memberi bahan-bahan bukti yang diperlukan oleh hakim.”⁹⁷

Putusan pengadilan mempunyai 3 (tiga) kekuatan, yaitu sebagai berikut:

1. Kekuatan Mengikat

Putusan Hakim mengikat para pihak berperkara dan kekuatan mengikat suatu putusan ada yang dalam arti positif dan dalam arti negatif. Dalam arti positif yaitu bahwa yang telah diputus hakim harus dianggap benar⁹⁸ (*res judicata pro veritate habetur*). Dalam arti negatif yaitu bahwa Hakim tidak boleh memutus lagi perkara yang sama, pokok perkara yang sama dan pihak yang sama (*nebis in idem*).

2. Kekuatan Pembuktian

Artinya Putusan hakim telah memperoleh kepastian hukum, bukti kebenaran hukum dan mempunyai kekuatan hukum dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta dapat dijadikan bukti dalam sengketa perdata yang sama.

⁹⁶ *Ibid*, h., 97

⁹⁷ *Ibid*, h., 98

⁹⁸ Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2008), h., 309

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kekuatan Eksekutorial

Yaitu kekuatan untuk dilaksanakan putusan peradilan itu secara paksa oleh aparat negara (*executorial e kracht, executorial power*).⁹⁹



⁹⁹ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.,122.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada maka hakim memutuskan untuk mengaulkan permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada termohon dan membebaskan seluruh biaya perkara kepada pemohon.
2. Dalam memutus perkara Nomor 0153/Pdt.G/2017/PA.Ppg, Majelis Hakim mempertimbangkan berbagai fakta yang ada seperti adanya pertengkaran yang berkelanjutan dari kedua belah pihak serta tidak adanya keinginan dari kedua belah pihak untuk berdamai yang mengakibatkan gagalnya upaya mediasi yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama sehingga dalam rangka mewujudkan kemaslahatan untuk kedua belah pihak, hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka pengadilan.
3. Mengingat pihak yang berperkara telah lama berpisah rumah dan pihak pemohon sendiri telah menikah lagi sebelum adanya pengajuan cerai talak ke Pengadilan oleh Pemohon, dapat dipastikan bahwa di luar pengadilan telah terjadi talak yang memisahkan hak dan kewajiban keduanya secara agama, sehingga tidak ada efek negatif yang ditimbulkan terkait dalam hal hubungan perkawinan. Hanya saja hal-hal yang berhubungan dengan keperdataan tetap saja menimbulkan efek negatif mengingat tidak adanya kepastian hukum terkait pernikahan mereka di hadapan hukum negara.

B. Saran

1. Dalam hal cerai talak, kebanyakan dari para suami memilih untuk menggantung status perkawinan dengan istrinya dikarenakan banyaknya biaya yang harus dikeluarkan. Untuk itu, penulis menyarankan agar biaya-biaya perkara dapat dipermurah dan biaya yang terkait dengan iddah dan mut'ah dapat disesuaikan dengan kebutuhan istri dan kemampuan suami.
2. Untuk para suami agar jangan menjadikan besarnya biaya perkara sebagai alasan untuk menggantungkan status istri dan anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- A Dzajuli. 2007. *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2015. *Fiqh Munakahat : Khitbah, Nikah dan Talak*. terj. Jakarta : Amzah.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub. 2005. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Surakarta : Era Intermedia.
- Abdul Manan. 2010. *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*. Ed.1. Cet Ke-1. Jakarta Timur: Kencana.
- Abdul Rahman Ghazali. 2012. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Abdurrahman. 2010. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Cet. 4. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Ahmad Rofiq. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmad Rofiq. 2015. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmad Warson Munawwir. 1997. *Al-Munawwir : Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Alaiddin Koto. 2011. *Sejarah Peradilan Agama*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Amin Patawari. 2019. *Mengakhiri Pengabdian Sebagai Hakim di Bumi Lancang Kuning*. Pekanbaru : Yayasan Gahara Muda Sehati.
- Amir Syarifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Cet. 1. Jakarta: Kencana.
- Berkas Penetapan Nomor 0522/Pdt.G/2017/PA.Ppg
- Berkas Perkara Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 0153/Pdt.G/2017/PA.Ppg
- Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*
- Hasan Ayyub. 2001. *Fiqh Keluarga*. Terj. Cet. Ke-1 .Jakarta : Pustaka al-Kautsar.
- Ibn Hajar al-‘Asqalani. 2018. *Bulughul Maram*. Cet. 1. Terj. Bandung: Marja.
- Ibnu Qadamah. 2013. *Al Mughni*. Jakarta: Pustaka Azzam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris. 2013. *Ringkasan Al Umm*. Terj. Jakarta: Pustaka Azzam,
- Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini. *Kifayatul Akhyar*. Surabaya: Bina Iman. tt). Cet Ke-2
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2007. *Al-Qur'an Cordoba Special For Muslimah* Bandung: PT. Cordoba International Indonesia
- Khalid Al-Husainan. *Fikih Wanita 1001 Problema Wanita*. Jakarta: Darul Haq. 2014
- Laporan Tahunan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian. 2018
- Mardani. 2013. *Hukum Islam : Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad Amin Suma. 2008. *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*. Cet. 2. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad Fu'ad Adbu Baqi. 1414 H. *al-Lu'lu' wal Marjan Koleksi Hadits Yang Disepakati oleh al-Bukhari dan Muslim*). Semarang : al-Ridha.
- Muhammad Syaifuddin. dkk. 2014. *Hukum Perceraian*. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Musthofa. 2005. *Kepaniteraan Peradilan Agama*. Cet. 2. Jakarta: Kencana.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudiro. 1999 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Burgerlijk Wetboek. Bab I Pasal I UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. cet. 30. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Rahmat Hakim. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Said bin Abdullah bin Thalib al Hamdani. 2002. *Risalah Nikah*. terj. Jakarta : Pustaka Amani.
- Subekti dan Tjitrosudibio. tt. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Sulaiman Ahmad Yahya al Faifi. 2015. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. terj. Cet 3. Jakarta : Pustaka al-Kautsar.
- Sulaiman Rasjid. 2007. *Fiqh Islam*. Cet Ke-40. Bandung : Sinar Baru Algesindo.
- Syaikh Kamil Muhammad. 'Uwaidah. 2007. *Fiqh Wanita*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Thami dan Sohari Sahrani. 2008. *Fiqih Munakahat*. Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada.

Wahyu Wibisana. *Pernikahan dalam Islam*. Ta'lim: Jurnal Pendidikan Agama Islam. Vol. 14. No. 2. 2016

https://id.wikipedia.org/wiki/Zakaria_al-Anshari

<https://wwwss.pa-pasirpengaraian.go.id>

<https://www.referensi makalah.com/2012/11/biografi-sayyid-sabiq.html>

<https://hahuwa.blogspot.com/2017/09/pengertian-kinayah-dan-macam-macamnya.html>

<https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/perpisahan/?c=Umum>

https://id.wikipedia.org/wiki/Mazhab_Zhahiri

<https://www.eramuslim.com/berita/silaturrahim/syekh-as-siba-i-pejuang-palestina-dari-suriah.htm#.XeZpBugzbIU>

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal 2-3 f10

P U T U S A N

Nomor 0153/Pdt.G/2017/PA.Ppg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

Darwis Ritonga bin Dame Ritonga, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan Karyawan Swasta, tempat di Afdeling VII Sei Rokan RT. 002, RW. 002, Desa Pagaran Tapah, Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**,
melawan

Linda Wati Hasibuan binti Syaripudin, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Afdeling VII Sei Rokan RT. 002, RW. 002, Desa Pagaran Tapah, Kecamatan Pagaran Tapan Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonananya tertanggal 20 Februari 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dengan register Nomor 0153/Pdt.G/2017/PA.Ppg, tertanggal 30 Februari 2017, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 31 Agustus 2008, di Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Batam, Kepulauan Riau, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Batam, Kepulauan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Riau, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 936/142/VIII/2008 tanggal 01 September 2008;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berkumpul baik dan tinggal di rumah kontrakan di Batam selama 10 bulan, terakhir pindah ke rumah PT Sei Rokan di Desa Pagaran Tapah;
 3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu :
 1. Asril Ritonga (laki-laki) umurnya 7 tahun;
 2. Wahyu Widayat (laki-laki) umurnya 4 tahun, anak tersebut sekarang berada dibawah asuhan Pemohon dan Termohon;
 4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan baik-baik dan rukun saja selama 2 tahun, namun setelah itu mulai tidak harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon apabila dinasehati oleh Pemohon, Termohon selalu membantah ucapan Pemohon;
 - b. Termohon kurang melayani seperti makan dan minum Pemohon;
 5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 07 Februari 2017, yang akhirnya menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon, karena ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 6. Bahwa atas permasalahan antara Pemohon dan Termohon pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Darwis Ritonga bin Dame Ritonga) untuk

Hlm. 2 dari 23 hlm, Putusan Nomor 0153/Pdt. G/2017/PA. Pa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menjatuhkan talak satu raj'i terhadap diri Termohon (Linda Wati Hasibuan) binti saripudin) di depan sidang Pengadilan Agama Pasir Pengaraian,

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan memberikan nasehat dan arahan kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator Elidasniwati, S.Ag., M.H sebagaimana lapor mediator tanggal 23 Maret 2017, tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban dan gugatan konvensi secara lisan pada tanggal 31 Maret 2017 sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Baha semua dalil permohonan Pemohon adalah benar, kecuali pada point 4, tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun selama 2 tahun, yang benar adalah rukun sampai 2016, dan terhadap penyebab yang di alihkan Pemohon, Termohon menanggapinya sebagai berikut:
 - a. Benar penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu membantah jika dinasehati Pemohon, tetapi disebabkan karena ada pihak ketiga, Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain bernama Sri dan pada bulan Januari 2017 Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan tersebut;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. **Ber** penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon kurang melayani makan minum Pemohon, tetapi disebabkan karena Pemohon selalu pulang pagi

- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk berpisah dari Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, tetapi Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

1. **Nal**ah iddah sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. **Mufat** berupa uang sebesar Rp.7.000.000,00(tujuh juta rupiah);
3. **Maskan** berupa uang sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. **Nal**ah untuk dua orang anak sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa;

Bahwa Termohon menjelaskan Pemohon memiliki penghasilan lebih kurang Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik secara lisan pada tanggal 02 Maret 2017 sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Bahwa pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan semula;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa atas tuntutan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menjawabnya sebagai berikut:

1. **Nal**ah idah sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), Pemohon sanggup sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. **Mufat** berupa uang sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Pemohon sanggup sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah),
3. **Maskan** berupa uang sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Pemohon tidak bersedia karena Termohon tinggal dirumah yang disediakan; perusahaan tempat Pemohon bekerja;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Nafkah untuk dua orang anak sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) Pemohon akan memberikan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa;

Bahwa terdapat replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula dan atas jawaban rekonsensi dari Tergugat Rekonsensi, Penggugat Rekonsensi tetap dengan tuntutan semula sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonsensi atas nafkah anak, Penggugat Rekonsensi tidak keberatan;

Bahwa atas replik Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi telah memberikan duplik Rekonsensi yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonsensi telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor. 396/142/VIII/2008 tanggal 01 September 2008, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Batam, bukti surat tersebut telah diberi Materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim telah memperlihatkan kepada Termohon dan Termohon membenarkannya;

B. Saksi-Saksi

1. Nuraini binti Dame Ritonga, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Melati Nomor 03, PKS Sei. Rokan, Desa Pagaran Tapah, Kecamatan Pafaran Tapah Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, menerangkan saksi adalah kakak kandung Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dengan Termohon tetapi saksi mengetahuinya, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2008 di Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikarunia 2 orang anak;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Batam selama 10 bulan dan terakhir pindah ke rumah PT Sei Rokan, di Desa Pagaran Tapah;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis, tetapi sejak September 2016 yang lalu, Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar tiga kali;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon, lebih baik mereka berpisah, karena saksi kasihan sama Termohon, apalagi sekarang Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain;
 - Bahwa setelah saksi sekarang Pemohon tidak bekerja, dulu semasa hubungan Pemohon dan Termohon baik, Pemohon ada bekerja dengan penghasilan lebih kurang Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
2. **Amrin bin Dahrin Panjaitan**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di RT.016, RW.005, Desa Genruang, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, menerangkan saksi adalah kakak ipar Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dengan Termohon tetapi saksi mengetahuinya, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2008 di Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hlm. 6 dari 23 hlm, Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/PA.Ppg



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Batam selama 10 bulan dan terakhir pindah ke rumah PT Sei Rokan, di Desa Pagaran Tapah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis, tetapi sejak akhir tahun 2016 yang lalu, Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Termohon, atas cerita Termohon tersebut saksi menasehati Pemohon, dan disamping itu saksi juga pernah ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon setuju saksi telah pisah tempat tinggal sejak 01 bulan yang lalu, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga, tetapi tidak berhasil karena Pemohon mau lagi berkumpul dengan Termohon, dan apalagi sekarang Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah lagi dari cerita Termohon, dan keluarga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setuju saksi sekarang Pemohon tidak bekerja lagi dan penghasilan Pemohon saksi juga tidak tahu;

Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi melalui Majelis Hakim menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut;

Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan bukti yang lain dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan alat bukti di persidangan;

Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menerangkan bahwasanya hanya sudah sama-sama menikah dengan orang lain;

Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan semula dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jawaban Rekonvensi, serta mohon Putusan;

Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Konvensi dan gugatan Rekonvensi semula serta mohon Putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim menunjuk akan segala yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.1, maka telah terbukti bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan

Hlm. 8 dari 23 hlm, Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/PA.Ppg



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan kedua pihak berperkara dan untuk memenuhi ketentuan dalam PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, atas perintah Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi yang dibantu oleh Elidasniwati, S.Ag., M.H sebagai mediator, sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Maret 2017, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Permohonan bermohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak satu raji' atas diri Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi, akibatnya sejak bulan Februari 2017 Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal bersama, alasan mana selengkapnya sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan atas permohonan Pemohon yang pada pokoknya menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali hal tegas Termohon mengakui kebenarannya sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula memberikan replik secara lisan atas jawaban Termohon yang pada pokoknya tetap dengan permohonan semula kecuali hal tegas Pemohon mengakui kebenarannya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah pula memberikan duplik secara

Hlm. 9 dari 23 hlm, Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/PA.Ppg



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lisan atas replik Pemohon yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana alasan perceraian yang dimaksudkan oleh ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena Pemohon telah mendalilkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, untuk itu Pemohon harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah menghadirkan bukti surat P.1 dan dua orang saksi bernama Nurani binti Dame Ritonga dan Amrin bin Daharim Pajaitan, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 alat bukti tersebut telah diberi materi cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, asli bukti tertulis tersebut merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volleding en bindende bewijskracht*) sesuai kekuatan pasal 285 R. Bg, oleh karena itu dapat diterima oleh alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama setempat, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan telah dilaksanakan menurut ketentuan pasal 171 ayat (1) dan ayat (2) R. Bg.

Menimbang, bahwa aksi Pemohon bernama Nuraini binti Dame Ritonga merupakan keluarga/ orang terdekat dari Pemohon (kakak kandung Pemohon), dan saksi tersebut telah disumpah, sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 175 R. Bg.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka secara formil kesaksian saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi tersebut, ternyata saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan perempuan lain, yang akhirnya sejak 3 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama, Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan perdamaian oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil. Bahwa saksi selaku kakak tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, lebih baik Pemohon dengan Termohon berpisah, apalagi sekarang Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama Nuraini binti Dame Ritonga dan Amrin bin Daharim Pajaitan merupakan keluarga/orang terdekat Pemohon (kakak ipar Pemohon) dan saksi tersebut telah disumpah, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi tersebut, ternyata saksi tidak pernah melihat dan mendengarkan Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi tahu ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon dan pernah juga menasehati Pemohon, yang mana penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, yang pada akhirnya Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama sejak satu bulan yang lalu, yang mana Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama. Bahwa saksi juga mendapat cerita dari Termohon dan dari keluarga Pemohon dan Termohon, bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut menerangkan mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan sekarang Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain, serta antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian tetapi tidak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhasil, karena Pemohon tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon, dan dimana pula Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama sampai dengan sekarang, hanya saja saksi berbeda dalam berapa lamanya Pemohon dengan Termohon berpisah, menurut saksi pertama Pemohon, Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 3 bulan yang lalu dan menurut keterangan saksi kedua, Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak satu bulan yang lalu, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Pemohon masing-masing bernama Nuraini binti Dame Ritonga dan Amrin bin Daharim Pajaitan sama-sama mengetahui antara Pemohon dan Termohon terjadi persidangan pertengkaran dan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah serta telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 309 R.Bg. keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut di atas dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi serta dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 306 R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan serta dihubungkan dengan permohonan Pemohon serta jawaban Termohon terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada 31 Agustus 2008, di Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Batam, Kepulauan Riau;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi berjalan rukun dan harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan sekarang Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak bulan Februari 2017, Pemohon dan Termohon tidak lagi

Hlm. 12 dari 23 hlm; Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/PA.Ppg.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tinggal bersama sampai dengan sekarang, dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan adanya ketidak utuhan bathin antara Pemohon dan Termohon untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia, ketidak utuhan tersebut, disamping itu juga Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan telah pula ditempuh upaya mediasi, namun kenyataannya tidak berhasil, hal tersebut terlihat juga dari tekat kuat Pemohon dan Termohon yang sama-sama ingin mengakhiri rumah tangganya, dan hal tersebut juga dilihat dengan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 sampai dengan sekarang, oleh karena itu menurut Majelis Hakim rumah tangga yang demikian telah pecah dan dimana pula antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, yang mengandung abstrak hukum bahwa "Isi pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 terpenuhi apabila iudex facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah", dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 534/K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang mengandung abstrak hukum, "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percercokan, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan tujuan perkawinan sebagai dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

Hlm. 13 dari 23 hlm, Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/PA.Ppg



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ذَلِكَ لَا يَسْتَوْفِقُونَ يَتَفَكَّرُونَ

dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dan ketentuan Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut diatas, maka rumah tangga Pemohon dengan sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan mereka sudah rapuh dan tidak dapat rasa ketenangan dan telah luput dari rasa cinta dan kasih sayang, jika tetap dipertahankan perkawinan tersebut tidak akan membawa kemaslahatan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami sudah tidak mau hidup satu atap lagi karena berselisih dan bertengkar tersebut, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*), dan dipandang dari segi filosofis bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, karena tujuan dari hukum Islam adalah meraih manfaat dan mencegah mafsadah, kerusakan, maka hubungan perkawinan yang sedemikian harus diputus dan atau dibubarkan karena telah nyata-nyata keluar dari koridor hukum yakni keluar dari bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan ikatan batin telah putus dan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang *sakinah* berlandaskan *mawaddah* dan *rahmah* yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan haram yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat

Hlm. 14 dari 23 hlm, Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/PA.Ppg



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon dan Termohon, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah Fikih yang berbunyi:

دَرَأِ الْمَفْسَادَ مَقْلَمَ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;

Menimbang bahwa tekad Pemohon yang tetap agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, hal ini telah relevan dengan firman Allah SWT. Dalam surat Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Dan jika suami berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, saksi-saksi yang diajukan Pemohon mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan akibat pertengkaran tersebut mengakibatkan Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Februari 2017 yang lalu, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon berdasar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum, dengan dikaitkan pula tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat

Hlm. 15 dari 23 hlm, Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/PA.Ppg



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Pasal 118 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pasir Pengaraian patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan yang ada dalam Konvensi digunakan kembali dalam Rekonvensi ini sebagai ada hubungannya hukumnya;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah, mut'ah, maskan dan nafkah anak diajukan oleh Penggugat Rekonvensi pada saat mengajukan jawaban yang pertama maka sesuai dengan Pasal 158 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dibenarkan dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak keberatan bercerai dengan Tergugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi menuntut:

- Nafkah idah sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Mut'at berupa uang sebesar Rp.7.000.000,00(tujuh juta rupiah);
- Maskan berupa uang sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah untuk dua orang anak sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 16 dari 23 hlm, Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/PA.Ppg



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Nafkah idah sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), Pemohon sanggup sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Mut'at berupa uang sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Pemohon sanggup sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah),
- Maskan berupa uang sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Pemohon tidak bersedia karena Termohon tinggal di rumah yang disediakan perusahaan tempat Pemohon bekerja;
- Nafkah untuk dua orang anak sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) Pemohon akan memberikan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semulan dan mengenai kesediaan Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kedua orang anak sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, Penggugat Rekonvensi menerimanya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah memberikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa atas tuntutan (gugatan Rekonvensi) dari Penggugat Rekonvensi, dan dari hasil jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 4.500.000,00 (lima juta rupiah) dan dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan dalam hal nafkah iddah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami apabila menceraikan isterinya dengan thalak raj'i, selama isteri tidak dalam keadaan nusyuz sebagaimana maksud pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi, hal ini sesuai

Hlm. 17 dari 23 hlm, Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/PA.Pgg



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama dalam masa iddah Penggugat Rekonvensi wajib menjaga dan memelihara dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh syara' baik itu menerima pinangan orang lain terlebih lagi melakukan pernikahan dengan laki-laki lain dan selama masa tersebut yang paling berhak atas diri Penggugat Rekonvensi adalah Tergugat Rekonvensi sebagai bekas suaminya karena memiliki hak rujuk atas dirinya, oleh karena itu selama masa iddah tersebut mengenai pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat Rekonvensi masih menjadi kewajiban dan tanggung jawab Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendasarkan pula pertimbangannya dengan hujjah Syariah dalam kitab Syarkawi Juz IV hal. 349 yang diambil alih sebagai pendapat hukum oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

نقطة المعتدة ان كانت رجعية بين أجسى الزوج عليها

Wajib nafkah bagi perempuan dalam masa iddah, jika talak raj'i, karena masih dalam tanggungan/kekuasaan bekas suami;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz, Majelis Hakim dapat membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberi atau menanggung biaya penghidupan sesuai kelayakan dan kepatutan yang mencerminkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesedian dari Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka Majelis Hakim sepakat dengan memperhatikan rasa kepatutan dan kewajaran dianggap cukup adil Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp. Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang selanjutnya akan ditetapkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), oleh karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan dalam hal mut'ah, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'i, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتْنَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa dalam hal mut'ah Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah menjalani pernikahan hingga saat ini telah berjalan lebih kurang 9 (sembilan) tahun lamanya, selama itu pula Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah merasakan pahit dan manisnya berumah tangga, dan dalam perkawinan tersebut Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pula dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan disamping itu dengan telah menikahnya Tergugat Rekonvensi dengan perempuan lain maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim sepakat dengan memperhatikan kepatutan dan batas-batas kewajaran yang memenuhi rasa keadilan membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang selanjutnya akan ditetapkan diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap maskan yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak bersedia memberikan karena saat ini Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah yang disediakan oleh perusahaan, dan atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut oleh Penggugat Rekonvensi dibenarkan;

Menimbang, bahwa atas keberatan Tergugat Rekonvensi dalam memberikan maskan kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis mempertimbangkan alasan dari Tergugat Rekonvensi tersebut telah beralasan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan hal tersebut dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi, dan oleh karena keberatan dari Tergugat Rekonvensi telah beralasan, maka Majelis Hakim sepakat menolak tuntutan maskan dari Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi terhadap kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama Asril Ritonga, umur 7 tahun dan Wahyu Hidayat, umur 4 tahun, sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri, dan dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan bersedia memberikan nafkah kepada kedua orang anak tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d), Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, nafkah terhadap anak merupakan kewajiban seorang ayah;

Menimbang, bahwa hal-hal yang menyangkut nafkah anak menurut pendapat Fuqaha' yang diambil alih sebagai pendapat hukum oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam Kitab Muhaadzab, Juz II, halaman 177 menjelaskan *"Ayah berkewajiban memberi nafkah untuk anak"* dari Kitab Al 'Um halaman 78 menjelaskan *"Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaianannya serta perawatannya"*;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya bersedia memberikan nafkah anak melebihi jumlah nafkah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri, selanjutnya ditetapkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah dihukum untuk membayar kewajiban tersebut diatas, maka Tergugat Rekonvensi

Hlm. 20 dari 23 hlm, Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/PA.Ppg



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperintahkan untuk menyerahkannya sebelum Tergugat Rekonvensi mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebahagian dan menolak untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Darwis Ritonga bin Dame Ritonga**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon Konvensi (**Linda Wati Hasibuan binti Saripudin**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;
3. Memeritahkan Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam ReKonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Nafkah 'iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
3. Menetapkan biaya hidup anak bernama Asril Ritonga, umur 7 tahun dan Wahyu Hidayat, umur 4 tahun, untuk masa yang akan datang sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri minimal sejumlah Rp.

Hlm. 21 dari 23 hlm, Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/PA.Ppg



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.000.000,00 (tsatu juta rupiah) setiap bulan;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajibannya sebagaimana tersebut pada poin 2 dan poin 3 diktum Putusan ini;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan ReKonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 771.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 Masehi, bersamaan dengan tanggal 09 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kani Zulkifli Firdaus, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Fithriati AZ, S.Ag dan Rahmiwati Andreas, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 Masehi bersamaan dengan tanggal 23 Rajab 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Edlerman, A.Md sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, diluar hadirnya Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,


Fithriati AZ, S.Ag

Hakim Anggota,


Rahmiwati Andreas, S.H.I

Ketua Majelis,




Zulkifli Firdaus, S.H.I

Panitera Pengganti


Edlerman, A.Md



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	680.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	771.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENETAPAN

Nomor 0522/Pdt.G/2017/PA.Ppg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

Darwis Ritonga bin Dame Ritonga, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan Karyawan Swasta, tempat di Afdeling VII Sei Rokan RT. 002, RW. 002, Desa Pagaran Tapah, Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Linda Wati Hasibuan binti Syaripudin, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Afdeling VII Sei Rokan RT. 002, RW. 002, Desa Pagaran Tapah, Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang penyaksian ikrar talak tanggal 18 Mei 2017, atas Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/PA.Ppg, tanggal 20 April 2017, Pemohon telah dibebankan untuk membayar hak-hak Termohon akibat perceraian sebagaimana dalam diktum Putusan tersebut, dalam persidangan Pemohon menyatakan belum siap dengan kewajibannya tersebut, dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menunda persidangan, dan atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah menunda persidangan sampai dengan tanggal 13 Juli 2017;

Hlm. 1 dari 3 hlm, Penetapan Nomor 0153/Pdt.G/2017/PA.Ppg



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 13 Juli 2017 ternyata Pemohon tidak datang menghadap kepersidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya untuk mengucapkan ikrar talak, meskipun pada persidangan tanggal 18 Mei 2017, Pemohon telah diperintahkan untuk hadir menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa sejak hari sidang penyaksiaan ikrar talak tersebut diatas dan bila dihitung dari penetapan sidang untuk penyaksian ikrar talak tanggal 09 Mei 2017 sampai dengan saat penetapan ini dibuat sudah melewati tenggang waktu 6 (enam) bulan, Pemohon tidak datang menghadap untuk mengucapkan ikrar talak dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk mengucapkan ikrar talak dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang, maka dengan demikian gugurlah kekuatan putusan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan dengan alasan yang sama;

Memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dangan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/PA.Ppg, tanggal 20 April 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sejumlah Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pasir Pengaraian tanggal 05 Desember 2017;

Ketua Majelis,

Zulkifli Firdaus
Zulkifli Firdaus, S.H.I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perincian Biaya Perkara :

- Panggilan Pemohon	Rp. 170.000,00
- Panggilan Terang	Rp. 170.000,00

-	<u>Panggilan Termohon</u>	Rp. 170.000,00
---	---------------------------	----------------

Jumlah	Rp. 240.000,00
--------	----------------

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Hlm. 3 dari 3 hlm, Penetapan Nomor 0153/Pdt.G/2017/PA.Ppg



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul *Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian No. 0153/Pdt.G/2017/PA.Ppg Mengenai Perceraian Tanpa Disertai Ikrar Talak* yang ditulis oleh :

Nama : Nurma Sriyatun
NIM : 11521201544
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 30 Desember 2019
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Lantai 3 (tiga) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 Januari 2020
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag
Sekretaris
Ahmad Fauzi, M.Ag
Penguji I
Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag
Penguji II
Ade Fariz Fathullah, M.Ag

.....
.....
.....
.....

Mengetahui :

Kasubbag Akademik Kemahasiswaan Dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.
NIP. 19750801 200701 1 023



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tan Syarif Kasim Riau

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/7175/2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini
menerangkan bahwa :

Nama : NURMA SRIYATUN
N I M : 11521201544
Jurusan : HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSIYAH)

Telah Lulus :

UJIAN KOMPREHENSIF

Yang diselenggarakan pada tanggal : 8 AGISTUS 2019

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 2 September 2019

Dekan,





UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web: <http://fasin.uin-suska.ac.id>, E-mail : fsihuinriau@gmail.com

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5786/2019
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 15 Juli 2019

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NURMA SRIYATUN
NIM : 11521201544
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Pengadilan Agama Pasir Pengaraian

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Analisi Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian no
0153/Pdt.g/2017/PA.Ppg Mengenai Perceraian Tanpa Disertai Ikrar Talak

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/24313
TENTANG



032010

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5786/2019 Tanggal 15 Juli 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : NURMA SRIYATUN |
| 2. NIM / KTP | : 11521201544 |
| 3. Program Studi | : HUKUM KELUARGA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN NO. 0153/PDT.G/2017/PA.PPG MENGENAI PERCERAIAN TANPA DISERTAI IKRAR TALAK |
| 7. Lokasi Penelitian | : PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 15 Juli 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hulu
Up. Kaban Kesbang dan Linmas di Pasirpengaraian
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telp. 0813 7210 2755
Kode Pos : 28557 Email : dpmptsp@rokanhulukab.go.id Website : http://dpmptsp.rokanhulukab.go.id

REKOMENDASI

NOMOR:503/dpmptsp/non izin-riset/213

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu, setelah membaca Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/24313 tanggal 15 Juli 2019 tentang Rekomendasi Pelaksanaan Riset / PraRiset dan pengumpulan Data untuk bahan **Skripsi**, dengan ini dapat diberikan rekomendasi kepada :

Nama	: NURMA SRIYATUN
Nomor Induk Mahasiswa	: 11521201544
Jurusan	: Hukum Keluarga
Jenjang	: S-1 (Strata 1)
Judul Penelitian	: Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian No.0153/PDT.G/2017/PA.PPG Mengenai Perceraian Tanpa Disertai Ikrar Talak
Lokasi Penelitian	: Pengadilan Agama Pasir Pengaraian

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak Melakukan Kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Riset dan Pengumpulan Data ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini. Terima Kasih

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian
Pada Tanggal : 17 Juli 2019



an. BUPATI ROKAN HULU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HULU



Ridwananto, S.IP
Pemuda Utama Muda
NIP. 197210061992011002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hulu .
2. Kementerian Agama Pasir Pengaraian
3. Pengadilan Agama Pasir Pengaraian
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau
5. Yang bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN
 Jalan Diponegoro No. 10-11 Telp. (0762) 91430
 Website: <http://www.pa-pasirpengaraian.go.id> - email: papasirpengaraian@gmail.com
PASIR PENGARAIAN – 28557

SURAT KETERANGAN
Nomor : W4-A7/1187/HK.05/10/2019

Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, setelah membaca surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/213 tanggal 17 Juli 2019 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk bahan skripsi, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: NURMA SRIYATUN
NIM	: 11521201544
Program studi/ jurusan	: Hukum Keluarga
Jenjang	: S-1 (Strata 1)
Semester	: 9
Kampus	: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Judul penelitian	: Analisa Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 0153/Pdt.G/2017/PA.Ppg Mengenai Perceraian Tanpa Disertai Ikrar Talak

telah selesai melakukan penelitian dan pengambilan data yang diperlukan di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.

Demikian surat keterangan ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.



Pasir Pengaraian, 22 Oktober 2019

Buhammaduddin, S.H, M.H

NIP. 19680929 200212 1 001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
 www.jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
 HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **NURMA SRIYATUN**
 NIM : **11521201544**
 Jurusan : **HUKUM KELUARGA**
 Judul : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM
 PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN NO.
 0153/PDT.G/2017/PA.PPG MENGENAI PERCERAIAN TANPA
 DISERTAI IKRAR TALAK**

Pembimbing : **Dr. Zulfahmi Bustami M.Ag**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 06 Januari 2020

An. Pimpinan Redaksi

M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL
NIP. 198804302019031010



Riwayat Hidup Penulis



Nurma Sriyatun, lahir di Singingi Kabupaten Kuantan singing pada tanggal 05 Juni 1997 merupakan anak ke tujuh dari delapan (8) bersaudara, lahir dari pasangan Ayahanda Maniso dan Ibunda Kusmia. Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar di SDN 011 Air Emas pada tahun 2009 kemudian melanjutkan pendidikan ke MTs Bahrul Ulum Air Emas dan lulus pada tahun 2012 lalu melanjutkan pendidikan ke SMA Babussalam Pekanbaru dan lulus pada tahun 2015.

Kemudian pada tahun 2015 berkat restu dan doa kedua orang tua, penulis melanjutkan pendidikan Strata-1 (S-1) tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum dengan jurusan Hukum Keluarga.

Selama menjadi mahasiswa, penulis melaksanakan magang selama 2 (dua) bulan di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian. Atas berkat dan rahmat Allah Subhanallah WaTa'ala serta doa dan dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian No. 0153/Pdt.G/2017/PA.Ppg Mengenai Perceraian Tanpa Disertai Ikrar Talak”** di bawah bimbingan langsung Bapak Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag. berdasarkan hasil ujian Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum pada tanggal 30 Desember 2019, penulis dinyatakan **LULUS** dan telah berhak menyandang gelar Sarjana hukum (SH).